# OPTIMALISASI FUNGSI PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA SUKOREJO DAN KARANGANOM, KECAMATAN KARANGBINANGUN, KABUPATEN LAMONGAN

**Skripsi**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat


Oleh:

**SITI ROMZAH**

**E04213103**

**PRODI FILSAFAT POLITIK ISLAM**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**SURABAYA**


**2018**

# PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : SITI ROMZAH

NIM : E040213103

Jurusan : FILSAFAT POLITIK ISLAM

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Juli, 2018

Saya yang menyatakan,

**Siti Romzah**
**NIM: E04213103**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : SITI ROMZAH

NIM : E04213103

Jurusan : FILSAFAT POLITIK ISLAM

Judul : Optimalisasi Fungsi Pendamping Lokal Desa dalam Pembangunan Desa Sukorejo dan Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 17 Juli, 2018

Pembimbing,

**Dr. Abdul Chalik, M. Ag**

**NIP.197306272000031002**

# PENGESAHAN SKRIPSI

**Skripsi ini oleh Siti Romzah telah dipertahankan di depan**

**Tim Penguji Skripsi**

Surabaya, 2 Agustus 2018

**Mengesahkan,**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat**

**Plt. Dekan,**

**Dr. Suhermanto, M.Hum**

**NIP. 196708201995031001**

**Ketua**

**Dr. Abdul Chalik, M.Ag**

**NIP. 197306272000031002**

**Sekertaris**

**Andi Suwarko, M.Si**

**NIP. 197411102003121004**

**Penguji I**

**Dr. HM. Ismail MH, M.Si**

**NIP. 196005211986081001**

**Penguji II**

**Dr. Ainur Rofiq Al Amin,S.H, M.Ag**

**NIP. 197206252005011007**

**KEMENTERIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**
**PERPUSTAKAAN**
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

| | |
|---|---|
| Nama | : Siti Romzah |
| NIM | : E04213103 |
| Fakultas/Jurusan | : Ushuluddin/Politik Islam |
| E-mail address | : siti.romzah323@gmail.com |

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

OPTIMALISASI FUNGSI PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA SUKOREJO DAN DESA KARANGANOM KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Agustus 2018

Penulis

( Siti Romzah )
*nama terang dan tanda tangan*

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Optimalisasi Fungsi Pendamping Desa dalam Pembangunan Desa Sukorejo dan Desa Karanganom di Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan. Ini memfokuskan kajiannya pada Tiga permasalahan. Pertama, tentang Bagaimana Mekanisme kerja pendamping Lokal Desa dalam pembangunan desa Sukorejo dan Desa Karanganom, kedua yaitu bagaimana tantangan yang dihadapi pendamping lokal desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa Sukorejo dan desa Karanganom, dan yang terahir yaitu Manfaat adanya pendamping lokal desa dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di desa Sukorejo dan desa Karanganom

Penelitian ini menekankan pada observasi langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penggalian data lewat wawancara serta didukung sumber refrensi literatur terkait untuk menganalisis temuan data. Metode yang digunakan ialah kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat langsung dalam menggali informasi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah kepala desa Sukorejo, kepala desa Karanganom, Pendamping Lokal Desa (PLD), serta masyarakat desa Sukorejo dan masyarakat desa Karanganom. Kajian ini menggunakan teori kebijakan publik dan efektivitas yang menganalisis tentang mekanisme kerja pendamping lokal desa, manfaat, tantangan pendamping lokal desa dalam pembangunan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme kerja Pendamping Lokal Desa dalam pembangunan di desa Sukorejo dan Karanganom meliputi beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan /evaluasi. Terdapat perbedaan dari dua desa tersebut dilihat dari peran masyarakat mengenai pembangunan seperti kurangnya aspirasi dalam forum rembug desa dan Musrenbangdes. Kesadaran masyarakat akan pembangunan perlu ditingkatkan karena masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan keikutsertaan dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam pemerintahan desa juga ditemukan kecurangan dalam pengelolaan dana desa, sehingga transparansi pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan pembangunan. Tantangan yang dihadapi pendamping lokal desa menyangkut masyarakat desa dan pemerintah desa yang meliputi komunikasi, birokrasi, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di dua desa tersebut. Tidak semua pemerintah dan masyarakat desa menerima keberadaan pendamping desa, sehingga perlu adanya sosialisasi dan pemahaman tentang pentingnya peran pendamping lokal desa dalam pembangunan. dan untuk meningkatkan program pembangunan di desa, perlu diiringi dengan kaderisasi perangkat desa agar pembinaan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pendamping desa dapat berjalan sistematis. Pendamping lokal desa memberi manfaat yang positif bagi desa seperti membantu, membimbing dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana desa. namun dari tingkat efektifitasnya peran pendamping lokal desa belum sepenuhnya efisien karena sumber daya yang ada belum diberdayakan secara optimal


Kata Kunci : *Kebijakan Publik, Pendamping Desa, Pembangunan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR ISI

JUDUL PENELITIAN (SAMPUL DALAM) .....i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....iv
MOTTO.....v
PERSEMBAHAN .....vi
KATA PENGANTAR .....vii
ABSTRAK .....ix
DAFTAR ISI.....x
DAFTAR GAMBAR .....xiii
DAFTAR TABEL.....xiv
BAB I : PENDAHULUAN .....1
A. Latar Belakang .....1
B. Rumusan Masalah .....9
C. Tujuan Penelitian .....9
D. Manfaat Penelitian .....10
E. Definisi Konseptual.....10
F. Penelitian Terdahulu .....21
G. Kerangka Teori.....25
H. Metode Penelitian.....33
I. Sistematika Penulisan.....40
BAB II : KERANGKA KONSEPTUAL .....41
A. Penjelasan Konsep Optimalisasi .....41
B. Kebijakan Publik .....42
1. Pengertian Kebijakan Publik.....42
2. Tahap- Tahap Keijakan Publik .....46
3. Ciri –Ciri Kebijakan Publik .....50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Efektifitas Kebijakan Publik .....51
C. Pembangunan Desa.....53
D. Fungsi Pendamping Desa Dalam Pendampingan .....59
1. Tahap Perencanaan .....62
2. Tahap Pelaksanaan.....63
3. Tahap Pemantauan dan Evauasi.....64
BAB III :*SETTING* PENELITIAN .....65
A. Deskripsi Desa Sukorejo.....65
1. Aspek Geografi .....65
2. Aspek Demografi .....66
3. Aspek Pemerintahan .....67
4. Aspek Ekonomi.....70
5. Aspek Sosial-Budaya .....71
B. Deskripsi Desa Karanganom.....73
1. Aspek Geografi .....73
2. Aspek Demografi .....74
3. Aspek Pemerintahan.....75
4. Aspek Ekonomi.....78
5. Aspek Sosial-Budaya .....78
C. Deskripsi Program dan Pendamping Desa.....81
1. Kriteria Pendamping Lokal Desa .....81
2. Pembekalan dan Penguatan Kapasitas Pendamping Lokal Desa .....84
3. Struktur Organisasi Pendamping Desa.....90
BAB IV : PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN .....93
A. Mekanisme Kerja Pendamping Lokal Desa .....93
1. Tahap Perencanaan..... 99
2. Tahap Pelaksanaan ..... 103
3. Tahap Pemantauan dan Evaluasi..... 107
B. Tantangan pendamping lokal desa dalam optimalisasi pembangunan ..... 109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Komunikasi ..... 111
b. Birokrasi ..... 112
c. Sumber daya Manusia (SDM) ..... 114
C. Manfaat Pendamping Lokal Desa dalam Pembangunan ..... 120
BAB V : PENUTUP ..... 129
1. Kesimpulan ..... 129
2. Saran ..... 132
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menurut masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.[1] Oleh karena itu keadilan menjadi syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila terhadap setiap masyarakat agar ia menjadi warga negara yang baik.[2]

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menerangkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa.[3] Pembangunan desa bertujuan untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan daya saing desa.[4] Rencana kerja pemerintah tahun 2015 mengamanatkan bahwa percepatan

---

[1] Moch Solekhan, *Penyelenggaraan dan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat*, (Malang:Setara Press,2014), Hlm.13
[2] Moh Kusnadi DKK, *Hukum Tata Negara Indonesa*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1998), Hlm. 153
[3] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
[4] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 7 ayat 3 Penataan Desa



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembagunan desa dilaksanakan melalui implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki tugas dan fungsi menjalankan urusan pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.[5] Dan upaya yang dilakukan untuk mendukung kelancaran implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu pemerintah melakukan pendampingan dengan dibantu oleh pendamping profesional yang berpengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat dan di bidang pembangunan desa. Tenaga ahli itu nantinya akan di tempatkan di Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.

Pendampingan Desa ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.[6] Pendampingan Desa ini dilaksanakan agar adanya pemerataan pembagunan dan percepatan pembangunan di desa dapat tercapai dengan cepat. Sehingga fasilitasi pemerintahan desa, pembagunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan masyarakat desa perlu dilakukan untuk mendorong penggunaan dana desa.

Adanya pengembangan yang dilakukan pemerintah dalam pendampingan desa dan masyarakat desa dalam hal ini diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Sebelum adanya pendampingan desa, pemerintah desa bekerja sendiri untuk melakukan

[5] Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa
[6] Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembangunan di desa. Untuk mengatasi permasalahan pembangunan yang ada di desa, pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyelenggarakan seleksi pendamping desa yang di tempatkan di Kabupaten, Kecamatan, dan di setiap desa.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas beragam Islam. Dan Islam merupakan agama yang syumul (menyeluruh), mengandung peraturan hidup yang sangat lengkap dan menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan. Kemajuan dan pembangunan nasional juga merupakan satu seruan dalam islam kepada semua umatnya agar berusaha untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Sebagaimana firman Allah S.W.T yang berbunyi:

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا ۚ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم
مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓا۟ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّى قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

*Artinya : Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. dia Telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, Karena itu mohonlah ampunan-Nya, Kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."*

Ayat tersebut dengan jelas mengabarkan fungsi dan peran manusia dihadirkan di muka bumi adalah untuk memakmurkannya. Tugas dan tanggung jawab ini menjadi kewajiban bersama umat manusia tanpa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memandang status sosial dan kesemuanya memikul amanat dalam kapasitasnya sebagai khalifah/pemakmur. Untuk mewujudkan pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan perlu adanya percepatan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat sehingga perlu adanya kerja sama dan saling bergotong-royong untuk mewujudkannya.

مَنْ كَانَ فِى حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِى حَاجَتِهِ

*Artinya :"Barangsiapa menolong saudaranya, maka Allah akan selalu menolongnya".(HR. Bukhari dan Muslim)*

Gotong- royong merupakan budaya dari bangsa Indonesia yang akan mempererat dan merekatkan persatuan. Dengan adanya saling tolong menolong maka akan tercipta kasih sayang dan rasa perhatian antar sesama. Jadi dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dibutuhkan gotong-royong dari semua masyarakat karena gotong- royong menjadi tulang punggung bagi kehidupan negeri ini.

Dengan demikian kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembangunan, sehingga perlu adanya pembinaan agar kemajuan desa dapat tercapai. Peran pendamping desa diharapkan dapat membina dan mendampingi pemerintah desa serta masyarakat agar gotong royong dan kerja sama membangun desa dapat terwujud. Pendamping desa ini mengawal pembagunan indonesia dari pinggiran, selain membangun dari pinggiran program pendamping desa ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) agar lebih baik lagi dalam mengelola pemerintahan khususnya di tingkat yang paling bawah yaitu di tingkat desa. Pendamping

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desa ini dinilai menjadi langka yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan birokrasi yang ada, sebab pendamping desa di tuntut untuk memfasilitasi aparatur desa dalam proses pembagunan. Selain itu pendamping desa juga memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas pemerintahan desa.

Dalam hal ini alasan pemerintah mendampingi dan mengawasi pemerintah desa dikarenakan masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di tingkat desa sehingga perlunya pendampingan dari pendamping desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Pendamping desa sangat diharapkan oleh pemerintah, mereka nantinya harus lebih masuk dalam tata kelola pemerintahan desa. Memastikan pemerintahan desa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), Lembaga kemasyarakatan desa dan komponen desa lainnya mengambil peran aktif dalam proses pembangunan desa, menjadi pengawas untuk melihat kinerja aparatur desa yang mereka dampingi.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah masalah yang membuat kinerja pendamping desa dinilai belum maksimal seperti yang di beritakan di media dan surat kabar sebagai berikut.

> "Di Kecamatan palas, Kabupaten Lampung Selatan, dinilai masih belum maksimal mendampingi pemerintah desa dalam mengawal pembagunan dari aggaran dana desa. Sebab, masih banyaknya pembagunan infrastruktur jalan yang rusak dan beberapa desa bermasalah. Hal tersebut di ungkap camat palas, rika wati saat ditemui diruag kerjanya, selasa (8/11/2016). Menurut Ika Wati sejauh ini pemerintah Kecamatan Palas menilai kinerja para pendamping desa belum optimal dalam mengelola dana desa dan RPJM Desa. Rika Wati menjelaskan memang kinerja pendamping

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> desa belum maksimal dalam mendampingi desa sebab dalam pengelolaan dana desa, seperti yang terjadi di desa palasaji[7].

Selain permasalahan kinerja yang dilakukan oleh aparatur desa dan kecamatan, terdapat pula permasalahan yang lain seperti kurang fokusnya pendamping desa dikarenakan tidak hanya mendampingi satu desa, sehingga kinerja pendamping desa untuk melakukan pendampingan belum maksimal seperti yang terjadi di Desa Bayusoco.

> "Kinerja petugas pendamping desa yang belum maksimal dikeluhkan oleh perangkat desa. Akibatnya pihak desa lebih bayak kerja sendirian dalam upaya penggunaan dana desa yang diberika pemerintaha pusat. Salah satu keluhan tentang petugas pendamping desa menurut kepala Desa Banyusoco, Kecamatan Playen Sutiyono. Menurut Kepala Desa Banyusoco keberadaan petugas ini belum maksimal dalam menjalaka perannya, karena fokus pekerjaan tidan menyasar pada satu desa.
> Akibatnya, pihak desa merasa bekerja sendirian untuk mewujudkan penyerapan dana desa semaksimal mungkin. Sutiyono menjelaskan, sepanjag tahunlalu haya sekali bertemu dengan petugas pendamping desa, itu pun hanya sekedar meminta surat pertanggung jawaban kegiatan.
> Pendamping harusnya mengawal sejak awal hingga program berakhir, tapi kenyataan di lapangan tidak seperti itu, implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa berdampak pada makin besarnya dana yang diterimahdi masing-masinhg desa. Si satu sisi upaya ini memberikan dampak yang positif, tapi tidak jarang pula membuat urusan desa mejadi lebih komplek dan rumit. Untuk itula dibutuhka peran dari pendamping desa. Sebab, petugas itu dibutuhkan untuk memberikan bantuan pemikiran ataupun solusi saat desa meghadapi suatu masalah. Jujur saat penyusunan pertanggungjawaban dana desa kami sempat megalami masalah, dan harusnya pendamping desa memberikan solusi.[8]

Tidak sedikit masyarakat yang mempertanyakan kinerja pendamping desa dan bagaimana tugas dan fungsi pendamping desa dalam mendampingi

---

[7] http://lampos.co/berita/kinerja-pendamping-lokal-desa-dinilai-belum-maksimal di akses pada 5 April 2018 pukul 11.33 WIB

[8] http:/www.harianjogja.com/baca/2016/03/25dana-desa-kades-keluhkan-kinerja-petugas-pendamping-desa-704157 di akses pada 5 April 2018 pukul 11.55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desa. Perlu di ketahui di Lamongan sendiri terdapat 239 tenaga ahli pendamping desa yang tersebar di 27 kecamatan. Tenaga pendamping desa ini diseleksi dalam beberapa tahap dan telah melalui proses yang panjang. Desa Sukorejo dan Desa Karanganom Kecamatan Karangbinagun Kabupaten Lamongan termasuk desa yang mendapatkan tenaga pendamping desa yang sudah berjalan aktif pada tanggal 03 Maret 2016 yang lalu.

Pendamping Desa di Kecamatan Karangbinangun ada Sepuluh Pendamping Desa, 3 (tiga) Pendamping Desa Pemberdayaan yang berkedudukan di Kecamatan, 1 (satu) Pendamping Desa Tehnik Infrastruktur yang berkedudukan di Kecamatan dan 6 Pendamping Lokal Desa yang berkedudukan di Desa. di Kecamatan Karangbinangun terdapat 21 (Dua puluh satu) desa dan 1 Pendamping Lokal Desa mendampingi 4-3 desa hal ini menjadikan fokus kerja pendamping lokal desa terbagi tidak dapat fokus mendampingi satu desa. dalam hal ini peneliti ingin melihat kinerja dari Pendamping Lokal Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di desa dan mendampingi 4 desa.

Desa Sukorejo dan desa Karanganom merupakan desa yang masih tertinggal serta pendidikan di desa Sukorejo dan desa Karanganom ini masih dalam taraf berkembang. Serta pembangunan fisik maupun non fisik masih jauh dari desa-desa yang lain, yang mana di desa Sukorejo dan desa Karanganom ini sangat membutuhkan adanya Pendamping Lokal desa. Hal ini menjadi perhatian bagi para petugas Pendamping Lokal Desa untuk mempercepat peningkatan pembangunan yang ada di desa. Karena peran dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendamping desa sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pembagunan desa. Berdasarkan masalah tersebut menurut peneliti salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pembangunan desa adalah dengan menyiapkan pendamping desa yang berkompeten.

Pendampingan desa dalam hal ini di tuntut untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat desa akan hak dan kewajiban sebagai warga desa. Pada hal ini pendamping desa harus memerankan diri sebagai *community organizer* yang harus jeli membaca fenomena hubungan antara kelembagaan dan masyarakat Desa. Pada akhirnya apakah adanya pendamping desa ini dapat menjadi solusi terhadap optimalisasi pembagunan desa, sehingga Kita bisa melihat apa manfaat adanya pendampingan desa,mekanisme kerja,serta tantangan apa nantinya yang akan di hadapi oleh pendamping desa.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahuinya lebih lanjut dalam penulisan bentuk Skripsi yang berjudul "Optimalisasi Fungsi Pendamping Lokal Desa dalam Pembagunan Desa Sukorejo dan Desa Karanganom Kecamatan Karangbinagun Kabupaten Lamongan

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme kerja Pendamping Lokal Desa di desa Sukorejo dan desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Apa tantangan Pendampingan Lokal desa dalam optimalisasi pembangunan desa Sukorejo dan desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan?
3. Apa manfaat Pendamping Lokal Desa dalam optimalisasi pembangunan desa Sukorejo dan desa Karanganom Kecamatan Karangbinagun Kabupaten Lamongan?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme kerja Pendamping Lokal Desa di desa Sukorejo dan Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui tantangan Pendamping Lokal Desa dalam optimalisasi pembangunan Sukorejo dan Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.
3. Untuk mengetahui manfaat pendamping Lokal Desa dalam optimalisasi pembangunan desa Sukorejo Kecamatan Karangbinagun Kabupaten Lamongan.

## D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini termasuk dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan yang khusus tentang politik. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada UIN Sunan Ampel Surabaya dan khususnya kepada Prodi Filsafat Politik Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberi landasan berpikir dalam melihat bagaimana Peran yang dilakukan pendamping desa penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan analisa dan wacana kedepan mengenai pendampingan di desa.

**E. Definisi Konseptual**

a. Konsep Pendamping Lokal Desa

1) Pendamping Lokal Desa

Pendamping Lokal Desa atau PLD adalah sebuah jabatan sebagai pendamping desa di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang desa, yang bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat disebuah desa.

Pendampingan desa merupakan mandate undang-undang desa kepada Negara dalam rangka mendorong desa yang kuat, maju, mandiri, demokratis dan sejahterah. Berdasarkan peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa, pengertian pendamping desa diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa.

Tindakan pemberdayaan yang salah satunya adalah asistensi sebagaimana yang disebutkan di atas, dapat dijelaskan mengapa perlu adanya asistensi dalam pendampingan desa. asistensi sendiri berarti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membantu pemerintah desa dalam menjalankan tugas profesionalnya. Asistensi ini bertujuan untuk membantu pemerntah desa dalam menjalankan tugas-tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa., karena terbatasnya kualitas dari aparatur desa itu sendiri sehingga perlu adanya asistensi dari pendamping desa.

2) Peraturan Tentang Pendamping Desa

Peraturan tentang pendampingan desa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015, pendampingan desa merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melakukan tindakan pemberdayaan kepada masyarakat melalui asistensi, pengordinasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Pendampingan desa dilaksanakan oleh Pendamping Lokal Desa. Pendamping Lokal Desa bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.[9]

Perbedaan mendasar model pendampingan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah ada tuntutan terhadap para pendamping desa untuk mampu melakukan transformasi sosial dengan mengubah secara mendasar pendekatan kontrol dan mobilisasi pemerintah terhadap desa menjadi pendekatan pemberdayaan masyarakat desa. Masyarakat desa dan

[9]Peraturan Menteri No 3 Tahun 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah desa sebagai satu kesatuan *self governing community* diberdayakan untuk mampu hadir sebagai komunitas mandiri. Dengan demikian, desa didorong menjadi subyek penggerak pembangunan Indonesia dari pinggiran, sehingga mampu merealisasikan salah satu agenda strategis prioritas pemerintahan yaitu "Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan"[10]

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memandatkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk memberdayakan masyarakat desa dengan:

a) Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa.
b) Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.
c) Mengakui dan memfungsikan institusi asli atau yang sudah ada di masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan antara lain dengan pendampingan desa. Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan

[10]Maria Christina "*Kinerja pendamping Desa Dalam peningkatan pembangunan desa di kecamatan kalirejo kabupaten lampung tengah*" skripsi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas lampung. 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberdayaan masyarakat desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan masyarakat desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/ kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa atau pihak ketiga.

3) Tugas pokok dan fungsi Pendamping Lokal Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa pada pasal 12, Tupoksi dari Pendamping Lokal Desa yaitu:[11]

a) Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sebagai tenaga ahli, pendampingan dalam peningkatan penyelengaraan pemerintahan desa harus dilaksanakan agar pembangunan desa serta kemajuan desa dapat terwujud.
b) Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
c) Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

[11]Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa pasal 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa. Pendampingan desa sangat berpengaruh dalam pendampingan kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat. Kelompok-kelompok yang ada harus diorganisasi agar dapat berkembang dan dapat memajukan desa.

e) Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru. Peningkatan sumber daya manusia merupakan hal penting untuk terwujudnya pembangunan desa yang partisipatif, oleh karena itu pendamping desa harus mampu untuk meningkatkan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat.

f) Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif. Tidak hanya pendampingan kepada aparatur desa, pendampingan desa juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan yang berwawasan lingkungan. Karena pembangunan desa dapat terwujudjika dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh aparatur desa dan seluruh masyarakat.

g) Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

h) Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor agar pembangunan desa dapat terwujud dalam pelaksanaannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak hanya melibatkan satu sektor namun harus ada beberapa sektor baik dari sektor ekonomi maupun sektor keamanan nasional.

i) Mengoptimalkan aset lokal desa secara amansipatoris. Aset lokal desa dalam penunjang pembangunan desa harus digunakan dengan optimal dan bijak. Oleh karena itu optimalisasi aset lokal desa oleh pendamping desa diperlukan untuk penunjang pembangunan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tugas Pendamping Desa dapat dimaknai bahwa, pendampingan terhadap desa pada prinsipnya adalah upaya untuk menggerakkan potensi yang ada di desa sehingga desa mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk perubahan-perubahan ke arah lebih baik dari sisi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Karena itu pendampingan desa tidak bisa hanya dilihat dan dimaknai sebagai aktivitas membantu desa menjalankan aspek-aspek teknokratis dan administratif saja. Lebih dari itu, pendampingan desa merupakan aktivitas mengubah nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa agar bisa diterjemahkan dalam perilaku keseharian di desa.

b. Konsep Pembangunan Desa

1) Pengertian Pembangunan Desa

Pembagunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dan merupakan usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarka potensi dan kemampuan desa. Dalam hal ini dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembagunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yag mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan[12]

Pembagunan desa mempunyai peranan yag sangat penting dalam konteks pembagunan nasional karena mencakup bagian terbesar dari wilayah nasional. Pembagunan masyarakat desa harus ditingkatkan untuk menunjang pembangunan desa. Pembagunan masyarakat desa dapat dilakukan melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia yang ada di pedesaan sehingga kreatifitas dan aktifitasnya dapat semakin berkembag serta kesadaran lingkungannya semakin tinggi.

Pemerintah desa mempunyai peranan yang sangat berpengaruh terutama dalam upaya untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan, yang dilakukan melalui penyampaian pesan-pesan pembagunan. Pengaraha kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat desa diwujudkan dalam bentuk pengerahan dan pemanfaatan dana dan daya yang ada dalam masyarakat untuk meningkatka kegiatan pembagunan di daerah pedesaan.

[12] Rahardjo Adisasmita, *Membangun Desa Partisipatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) Halm 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pengertian mengenai pembagunan desa tersebut, dapat dimaknai bahwa pembagunan desa merupakan sebuah konsep pembagunan yang berbasis pedesaan denga tetap memperhatikan ciri khas sosial budaya masyarakat yang tinggal di kawasan pedesaan. Pembagunan desa di harapakan menjadi solusi bagi perubahan sosial masyarakat desa dan menjadikan desa sebagai basis perubahan.

2) Tujuan Pembangunan Desa

Tujuan dari pembagunan desa di bagi mejadi 2 yaitu pembagunan desa jangka panjag dan pembangunan desa jagka pendek. Tujuan desa jangka panjang yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha da mendapatkan berdasarkan pada pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia, dan yang secara tidak langsung ialah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembagunan nasional. Sedangkan tujuan pembagunan jagka pendek yaitu meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan dalam pemafaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam.[13]

Pembangunan desa secara spasial dapat dirumuskan yaitu terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri. Berwawasan lingkungan, selaras, serasi dan bersinergi dalam kawasan pedesaan lain melalui pembagunan komprehensif dan berkelanjutan untuk terwujudnya

[13] Rahardjo Adisasmita, *Pembagunan Pedesaan; Pendekatan Partisipatif,Tipologi Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan,* (Yogyakarta: Graha Ilmu,2013) Halm 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera.[14]

Pada hakekatnya tujuan umum dari pembagunan desa adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui pencapaian kemajuan sosial dan ekonomi secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prisip keadilan bagi masyarakat secara keseluruan. Dari megenai pengertian pembagunan desa dapat dimaknai bahwa tujuan dari pembangunan desa suatu usaha yang dilakukan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

3) Strategi Pembangunan Desa

Pembagunan masyarakat desa merupakan bagian dari pembagunan masyarakat yang diarahkan kepada pembagunan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan pada satua wilayah pedesaan. Setiap negara menerapkan strategi pembagunan untuk memecahkan masalah yang di hadapi terutama menyangkut pertumbuhan penduduk, kemiskinana, dan pengangguran masyarakat.

Untuk mewujudka tujuan dari pembagunan desa, terdapat empat jenis strategi menurut adisasmita[15] yaitu:

---

[14] Rahardjo Adisasmita, *Pembaguna Pedesaan Dan Perkotaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) Halm 3

[15] *Ibid Pembagunan Pedesaan; Pendekatan Partisipatif*, halm 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Strategi pertumbuhan

Strategi pertumbuhan dimaksudkan untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekonomis melalui peningkatan pendapatan penduduk, produktivitas sektor pertanian, permodalan, kesempatan kerja dan peningkatan kemampuan konsumsi masyarakat desa.

b. Strategi kesejahteraan

Strategi kesejahteraan pada dasarnya dimaksudka untuk memperbaiki taraf hidup ataupun kesejahteraan penduduk perdesaan melalui pelayanan dan peningkatan program-program pembangunan sosial yang berskala besar atau nasional.

c. Strategi tanggap terhadap kebutuhan masyarakat

Strategi ini merupakan reaksi terhadp strategi kesejahteraan yag dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang dirumuska masyarakat sendiri dengan batua pihak luar untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi dan tersedianya sumber-sumber daya yang sesuai kebutuhan di desa.

d. Strategi terpadu menyeluruh

Strategi terpadu dan menyeluru tersebut ingin mencapai tujuan-tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat secara simultan dalam proses pembagunan pedesaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan megenai strategi pembagunan desa tersebut, dapat dimaknai bahwa strategi pembagunan desa dimaksudkan agar kemandirian desa serta tujuan yang meyangkut kelangsungan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

## F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan Penelusuran terhadap penelitian dan penyajian yang telah ada, ditemukan karya ilmiah terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

1. Melda Budiarti (2016)

Penelitian ini berjudul *"Kesiapan Dan Strategi Pemerintah Desa Dalam Implementasi Kebijakan Undang Undang Nomor 6 Tahun2014 Tentang Desa(Studi Penelitian Di Desa Sumur Tujuh Kec. Wonosobo Kab.Tanggamus)"*[16] Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Hasil dalam penelitian ini meunjukkan adanya kesiapan dan strategi pemerintah serta kendala yang di hadapi pemerintah desa dalam mengimplementasikan kebijakan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 . Namun dalam penelitian ini yang akan di teliti adalah terkait dalam pelaksanaan pendamping desa di Kecamatan Mantub lebih menitik beratkan

[16]Melda Budiarti "*Kesiapan Dan Strategi Pemerintah Desa DalamImplementasi Kebijakan Undang Undang Nomor 6 Tahun2014 Tentang Desa(Studi Penelitian Di Desa Sumur Tujuh Kec. Wonosobo Kab.Tanggamus)*" Skripsi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas lampung. 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada bagaimana aktifitas pendamping desa dalam upaya melakukan pemberdayaan pada masyarakat serta apa saja hambatan tenaga pendamping desa dalam pemberdayaan masyarakat.

2. Rizky A. Prasojo dan Luluk Fauziah (2015)

Penelitian ini berjudul *"Peran Pemerintah-Masyarakat dalam pemabngunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo"*[17] Jurnal Administrasi Negara

Hasil penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peran pemerintah-masyarakat dalam pembngunan desa Sedatigede Kecamatan Sedati kabupaten Sidoarjo serta bagaimana Faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil penelitian meunjukkan bahwa peran pemerintah-masyarakat dalam pemabngunan Desa Sedatigede cukup baik dan seimbag. Sedangkan, faktor pendukung kerjasama pemerintah-masyarakat adalah masyarakat telah memahami dengan baik posisi dan perannya dalam pembagunan. Selain itu, faktor penghambatnya adalah masih adanya aggapa pemerintah bahwa masyarakat adalah bawahan dan objek dalam pengawasan pembagunan.

3. Moh Mohlis (2016)

Penelitian ini berjudul *"Telaah Yuridis terhadap pelaksanaan pendamping desa dalam mewujudkan kesejahteraan ( studi kasus di kecamatan guluk-guluk Kabupaten Sumenep)"*

[17] Rizky Prasojo dan Luluk Fauziyah "*Peran Pemerintah-Masyarakat dalam pemabngunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo"* Jurnal KANAL. Prodi Ilmu Administrasi Negara-FISIP Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Volume 3, No 1, halm 49 tahun 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil dari penelitan ini menunjukkan pelaksanaan pendamping desa di kecamatan Guluk-guluk berdasarkan peraturan mentri desa, peratuan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 3 tahun 2015 tentang pndamping desa, adanya pendamping desa ini dapat diketahui bahwa pendamping desa akan berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa keberadaan pendamping dsa ini belum maksimal adapun kurangnya tenaga ahli pendamping desa dalam memfasilitasi, keterbatasan pengalaman dan pengetahuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegatan di desa.[18]

4. Rezky Susanti (2015)

Judul penelitian ini *"Efektifitas pendampingan desa dan pertisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pedesaan di dessa sekodi kecamatan Bengalis kabupaten bengkalis"*

Hasil dari penelitian ini tentang pendampingan desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infastruktur pedesaan di desa sekodi ini di rasa kurang efektif, hal ini karena pengetahuan masyarakat yang masih kurag tahu tentang keberadaan pendamping desa dan partisipasi masyarakat yang kurang aktif[19]

---

[18]Moh Mohlis *" Telaah Yuridis terhadap pelaksanaan pendamping desa dalam mewujudkan kesejahteraan studi kasus di kecamatan Guluk-guluk kabupaten sumenep*" Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yagyakarta. 2016

[19]Skripsi Rezky Susanti " *Efektifitas pendamping Desa dan Partisipasi masyarakat dalam pembagunan infrastruktur pedesaan di desa sekodi kecamatan bengkalis kabupaten bengkalis*. Bina Widya, Pekan Baru 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Perestroika Naek Pakkat (2016)

Penelitian ini berjudul "*Peran Tenaga Pendamping Desa Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2016 tentang Desa Dengan Upaya Optimalisasi Pembangunan desa"* Skripsi Fakultas Hukum UNPAS

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di lakukan oleh penulis adalah sama-sama mempunyai pembahasan pada tenaga pendamping desa untuk megoptimalka pembagunan desa. Hanya saja penelitian yang dilakukan oleh Parestroika naek Pakkat lebih menekankan pada peran yang akan di lakukan pendamping desa untuk mengoptimalkan pembagunan desa sesuai denga Undang-Undang, sedangkan Penulis lebih menekankan pada manfaat adanya pendamping desa, mekanisme kerja pendamping desa serta Tantangan yang akan di lalui pendampig desa.

Hasil penelitia ini menunjukkan bagaimana peran pendamping desa dalam mengoptimalisasikan pembangunan desa, serta rekrutmen tenaga pendamping desa, dan mengkaji pada hambatan dan upaya apa yang dilakukan pendamping desa dalam mengoptimalisasikan pembangunna desa berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa.[20]

Dengan demikian dari beberapa penelitian di atas sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh peneliti pada penulisan skripsi ini. Karena yang dilakukan di penelitian ini lebih berfokus pada Optimalisasi fungsi pendamping desa dalam pembagunan di Desa Sukorejo dan di Desa

[20]Perestroika Naek Pakkat "*Peran Tenaga Pendamping Desa Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2016 tentang Desa Dengan Upaya Optimalisasi Pembangunan desa*" Skripsi Fakultas Hukum Unpas.2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan, yang mana dalam penelitian ini yang mana berusaha mendeskripsikan fenomena pemafaatan, mekanisme kerja, serta tantangan yang di lakukan pendamping desa pada dua desa yang berbeda.

## G. Kerangka Teori

Kerangka dasar teori adalah teori-teori yang digunakan dalam melakukan suatu juga untuk menguji ataupun menyingkronkan data lapangan dengan teori yang digunakan dalam penelitian tersebut, sehingga penelitian yang dilakukan menjadi jelas, sistematis, dan ilmiah. Kerangka dasar teori tersebut digunakan unruk lebih mejelaskan permasalahan yang ada sehingga menjadi lebih jelas denga kerangka dasar pemikiran yang benar.

Teori adalah merupakan alat yang terpenting dari suatu ilmu pengetahuan. Tanpa teori hanya ada pengetahua tentang serangkaian fakta saja, tetapi tidak akan ada ilmu pengetahuan. Kecuali (1) Menyimpulkan generalisasi-generalisasi dan fakta-fakta hasil pengamatan, teori itu juga; (2) memberikan keragka orientasi untuk analisa dan klasifikasi dari fakta-fakta yang dikumpulkan dalam penelitian; (3) memberi lamaran terhadap gejala-gejala baru yang akan terjadi; (4) mengisi lowongan-lowongan dalam pengetahuan kita tentang gejalah-gejalah yang telah atau sedang terjadi.[21]

[21] Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta:P.T Gramedia,1997),hal 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Penjelasan Konsep Optimalisasi

Optimal di definisikan sebagai sesuatu terbaik, tertinggi, paling menguntungkan[22]. Optimalisasi adalah hasil yang di capai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien".[23] Optimalisasi banyak juga di artikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat di penuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Sedang menurut Winardi Optimlaisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan[24] sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha untuk memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang di inginkan atau yang dikehendaki. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal. Dari pengertian optimalisasi di atas, maka yang penulis maksudkan adalah mengoptimalkan peran dan fungsi pendamping desa dalam pembangunan desa.

2. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Penggunaan istilah kebijakan *(policy)* seringkali dipertukarkan dengan istilah-istilah lain, seperti tujuan *(goals)*, program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar.

[22]Ali, M. A., "*Analisis Optimalisasi Pelayanan Konsumen Berdasarkan Teori Antrian pada Kaltimgps.Com di Samarinda*" Ejournal Ilmu Administrasi Bisnis, 2014
[23] Partanto dan M dahlan, *Kamus ilmiyah popular* ( Surabaya apolo 1994) hal 545
[24] Boyke richrd "*Optimalisasi peran pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di kawasan perbatasan* ´Ilmu pemerintahan FISIP Unsrat 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi para pembuat kebijakan (policy makers) istilah-istilah tersebut tidak akan menimbulkan masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama. Namun, bagi orang-orang yang berada di luar struktur pengambilan kebijakan, istilah-istilah tersebut mungkin akan membingungkan.[25]

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.[26] Pengertian mengenai Kebijakan atau *policy* berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrumen untuk mengatur penduduk dari atas ke bawah.[27]

b. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Dalam proses pembuatan kebijakan publik, dibagi dalam beberapa tahapan yang dikelompokkan untuk memudahkan dalam menganalisis suatu kebijakan publik. Tahapan-tahapan tersebut terhadap kebijakan publik dapat dikelompokkan oleh menurut Willian Dunn, sebagai berikut:[28]

---

[25] Arifin Tahir, *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan pemerintah Daerah*, (Bandung : ALFABETA, 2014) Hal 20

[26]http://kbbi.web.id/bijak (Jumat, 29 juni 2018, 22.24)

[27]Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2012), 20.

[28] Willian Dunn, *Analisis Kebijakan Publik,* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999) 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Tahap Penyusunan Agenda

b) Tahap formulasi kebijakan

c) Tahap adopsi kebijakan

d) Tahap Implementasi kabijakan

e) Tahap evaluasi kebijakan

c. Ciri-ciri Kebijakan Publik

David Easton dalam Wahab, mengemukakan bahwa ciri-ciri khusus kebijakan pemerintah bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan oleh apa yang beliau sebut sebagai orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik. Dari penjelasan Easton di atas membawa implikasi tertentu terhadap konsep kebijakan, yakni:[29]

a) Kebijakan lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai prilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan.

b) Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas, tindakan-tindakan yang saling terkait dan yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat.

c) Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.

d) Kebijakan pemerintah mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuk yang positif, kebijakan mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu. Sementara dalam bentuk yang

[29]http://www.artikelsiana.com/2015/11/kebijakan-publik-pengertian-contoh-ciri.html, diakses pada Rabu, 15 November 2017, pukul 08.51 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negatif, kemungkinan meliputi keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru diperlukan.

d. Efektivitas Kebijakan Publik

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Menurut Gedeian, mendefinisikan efektivitas adalah *That is, the greater the extent it which an organization`s goals are met or surpassed, the greater its effectiveness* (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas).[30]

3. Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dan merupakan usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarka potensi dan kemampuan desa. Dalam hal ini dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan[31]

---

[30]http://www.psychologymania.com/2012/12/definisi-efektivitas.html, diakses pada Jum'at, 29 juni 2018 pukul 08.54 WIB.

[31] Rahardjo Adisasmita, *Membangun Desa Partisipatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) hal 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam konteks pembangunan nasional karena mencakup bagian terbesar dari wilayah nasional. Pembangunan masyarakat desa harus ditingkatkan untuk menunjang pembangunan desa. Pembangunan masyarakat desa dapat dilakukan melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia yang ada di pedesaan sehingga kreatifitas dan aktifitasnya dapat semakin berkembang serta kesadaran lingkungannya semakin tinggi.

Tujuan dari pembagunan desa di bagi mejadi 2 yaitu pembagunan desa jangka panjag dan pembangunan desa jagka pendek. Tujuan desa jangka panjang yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan mendapatkan berdasarkan pada pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia, dan yang secara tidak langsung ialah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembagunan nasional. Sedangkan tujuan pembagunan jangka pendek yaitu meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan dalam pemafaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam.[32]

Pembangunan desa secara spasial dapat dirumuskan yaitu terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri. Berwawasan lingkungan, selaras, serasi dan bersinergi dalam kawasan pedesaan lain melalui pembagunan komprehensif dan berkelanjutan untuk terwujudnya

[32] Rahardjo Adisasmita, *Pembagunan Pedesaan; Pendekatan Partisipatif,Tipologi Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan,* (Yogyakarta: Graha Ilmu,2013) Halm 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera.[33]

4. Fungsi Pendamping Desa dalam Pembangunan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa pada pasal 12, tugas dari Pendamping Lokal Desa yaitu:[34]

a) Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sebagai tenaga ahli, pendampingan dalam peningkatan penyelengaraan pemerintahan desa harus dilaksanakan agar pembangunan desa serta kemajuan desa dapat terwujud.
b) Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
c) Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
d) Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok- kelompok masyarakat desa. Pendampingan desa sangat berpengaruh dalam pendampingan kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat.

[33] Rahardjo Adisasmita, *Pembaguna Pedesaan Dan Perkotaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) Hal 3
[34]Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa pasal 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelompok-kelompok yang ada harus diorganisasi agar dapat berkembang dan dapat memajukan desa.

e) Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru. Peningkatan sumber daya manusia merupakan hal penting untuk terwujudnya pembangunan desa yang partisipatif, oleh karena itu pendamping desa harus mampu untuk meningkatkan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat.

f) Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif. Tidak hanya pendampingan kepada aparatur desa, pendampingan desa juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan yang berwawasan lingkungan. Karena pembangunan desa dapat terwujudjika dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh aparatur desa dan seluruh masyarakat.

g) Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

h) Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor agar pembangunan desa dapat terwujud dalam pelaksanaannya tidak hanya melibatkan satu sektor namun harus ada beberapa sektor baik dari sektor ekonomi maupun sektor keamanan nasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i) Mengoptimalkan aset lokal desa secara amansipatoris. Aset lokal desa dalam penunjang pembangunan desa harus digunakan dengan optimal dan bijak. Oleh karena itu optimalisasi aset lokal desa oleh pendamping desa diperlukan untuk penunjang pembangunan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tugas Pendamping Desa dapat dimaknai bahwa, pendampingan terhadap desa pada prinsipnya adalah upaya untuk menggerakkan potensi yang ada di desa sehingga desa mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk perubahan-perubahan ke arah lebih baik dari sisi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Karena itu pendampingan desa tidak bisa hanya dilihat dan dimaknai sebagai aktivitas membantu desa menjalankan aspek- aspek teknokratis dan administratif saja. Lebih dari itu, pendampingan desa merupakan aktivitas mengubah nilai-nilai yang terkandung dalamUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa agar bisa diterjemahkan dalam perilaku keseharian di desa.

## H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif.Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati.[35]

[35]Lexy J, Moleong. *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,1999) hal 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini peneliti dituntut untuk langsung terjun ke lapangan dimana penelitian dilakukan, kemudian peneliti menggunakan pendekatan terhadap orang-orang yang dijadikan sebagai bahan informasi, sehingga dapat diperoleh data-data secara keseluruhan dan tertulis.

2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul yang digunakan oleh peneliti, tempat penelitian berlokasi di Desa Sukorejo dan Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

a) Karena Desa Karanganom dan Desa Sukorejo adalah salah satu desa yang ada pendamping desanya, dan pendamping desa ini merupakan implementasi dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pendamping desa disini bertugas mendampingi desa dalam pembagunan desa.
b) Dalam segi infrastuktur pembangunan desa ini perlu adanya perbaikan setelah di keluarkan UU tentang desa
c) Satu orang Pendamping Desa ini mendampingi 2 desa yaitu di Desa Sukorejo dan Desa Karanganom sudah sesuai atau tidak pembagunan yang telah di capai oleh Pendamping Desa.

3. Informan Penelitian

Dalam penentuan informan berdasarkan prosedur penentuan informan *Purposive Sampling*, dimana merupakan salah satu strategi menentukan informan dengan menentukan kelompok peserta yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi informan sesuai dengan kriteria yang dipilih dan revelan dengan masalah yang diteliti.[36]

Peneliti telah menentukan informan yang relevan dan dianggap bisa memberikan informasi mengenai masalah yang ada, yakni sebagai berikut:

a) Kepala Desa Sukorejo Kecamatan karangbinangun Kabupaten Lamongan (Selaku mitra kerja pendamping lokal desa)
b) Kepala Desa Karangaom Kecamata Karagbinagun Kabupaten Lamongan (selaku mitra kerja pendamping lokal desa)
c) Aktor Pendamping Desa Kecamatan Karangbinangun kabupaten Lamongan (Selaku unsur yang memiliki tugas melakukan pendampingan desa)
d) Masyarakat Desa Sukorejo dan Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan

4. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau nara sumber sebagai sebagai informan yang langsuung berhubungan dengan focus penelitan. Tehnik penelitian informan dalam penelitan ini adalah menggunakan tehnik *purposive sampling.*dalam tehnik ini, siapa yang diambil sebagai anggota sampel

[36] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kenaca Prenada Media Group, 2007), hal 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(informan) diserahkan pada pertimbangan pengumpulan data yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan penelitian.[37]

Peneliti telah menentukan informan yang ada dalam mendukung untuk memperoleh data, sebagai berikut:

a) Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan (Selaku Mitra Kerja dari Pendamping Lokal Desa)
b) Kepala Desa Karaganom Kecamatan Karangbinagun Kabupaten Lamongan (Selaku Mitra Kerja Dari Pendamping Lokal Desa)
c) Aktor Pendamping Desa di Desa Sukorejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten lamongan (Selaku Unsur yang memiliki tugas melakukan pendampinga desa)
d) Masyaraka Desa Sukorejo dan Desa Karanganom, Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan

b. Data Skunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber selain data primer.Dilihat dari segi sumber data bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat di bagi atas sumber buku, majalah ilmiah, media cetak, Koran, sumber dari arsiip dan dokumen pribadi, serta dokumen resmi serta catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian ini.

[37]Irawan Soehartono, *Metodelogi penelitian sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,1999) hal 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan gabungan dari teknik dibawah ini:

a. Observasi

Metode observasi adalah cara pengumpulan data dengan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara cermat dan sitematik.[38] Teknik observasi dalam pengumpulan data merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yakni fakta mengenai dunia nyata yang diperoleh berdasarkan observasi. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, peneliti dapat mengamati fenomena atau kegiatan yang relevan dengan yang akan di teliti di lokasi. Selain itu dengan teknik ini juga memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposional[39] maupun pengetahuan yang diperoleh langsung dari data yang berhubungan dengan judul, yakni "Optimalisasi fungsi pendamping Lokal dalam Pembangunan Desa Sukorejo dan Desa Karanganom Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

b. Wawancara

Menurut Moleong, Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu

[38]Soeatno & Lincolin Arsyad, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan percetakan Akademi Managemen Perusahaan YKPN, 1995) hal 89

[39] Dr. Lexy Moeleong. *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2012) 174

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pewawancara yang mengajukan pertayaan dan smber informasi yang diberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan tujuan mengumpulkan data primer yang sesuai dengan tujuan peneliian yang akan dicapai. Tehnik wawancara yang digunakan adalah wawancara kepada subjek dengan menggunakan pedoman wawancara. Perangkat pedoman wawancara yang akan digunakan memuat pertanyaan yang bersifat terbuka wawancara bersifat terbuka dalam hal ini diharapkan akan memperoleh data sebanyak mungkin, dan mendalam dan agar data yang digali nantinya tidak terlalu melebar dari topik utama dan tujuan penelitian yang sebenarnya.. Dengan begitu subjek mengungkapkan pandangan-pandangannya menurut pespektif mereka masing-masing[40]

Dalam proses wawancara dengan informan yang telah ditentukan terkait dengan judul yang akan dijadikan penelitian, yakni " ptimalisasi fungsi pendamping desa (sudi kasus di desa Sukorej kecamatan karangbinangn kabupaen lamongan)"

c. Dokumentasi

Dokumentasi brasal dari kata Dokumen, yang artinya barang-barang tertulis.Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti mengambil data yang diperoleh melalui benda-benda tertuls seperti buku-buku, majalah, Dokumen, tulisan dari sesorang. Dalam hal ini

[40]Dedy Mulyana. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandumg: PT,Rosda Karya 2002) hal 184

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian yang dilakukan maka peneliti menggunakan gambar yang dalam hal ni adalah foto dan sebagainya.

6. Tehnik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara dikumpulkan menjadi satu sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Hubermas mengemukakan bahwa ada tiga aktivitas dalam analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai selesai yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion).

a) Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses perangkuman, pemilihan, pemusatan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya

b) Penyajian data

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, matrik, grafik dan jaringan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Semua itu digunakan untuk mempermudah peneliti agar dapatmemahami apa yang disajikan.

c) Penarikan kesimpulan

Kemudian, penarikan kesimpulan berupa konfigurasi utuh selama penelitian berlangsung kemudian peneliti menganalisis dan mencari pola, tema persamaan, hal-hal yang sering timbul dan lain sebagainya yang yang dituangkan dalam kesimpulan yang bersifat tentetif dan setiap kesimpulan yang diletakkan akan terus-menerus diverifikasi hingga benar-benar diperoleh konklusi[41] yang valid dan kokoh.

## I. Sistematika Penulisan

Penyusunan BAB dalam proposal ini meliputi

BAB I membahas pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pnelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II membahas kerangka teori yang terdiri dari landasan teoritis, kerangka konseptual.

BAB III membahas metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data.

[41]Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitin Sosial*, (Yogyakarta: 2006) hal 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV membahas hasil dari penelitian, yang berisi tentang Optimalisasi fungsi Pendamping Desa

BAB V membahas mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dibuat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# KERANGKA KONSEPTUAL

## A. Penjelasan Konsep Optimalisasi

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa Optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Sedang optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu paling baik atau paling tinggi. Jadi, optimalisasi adalah suatu proses mengoptimalkan sesuatu atau proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik.[42]

Optimalisasi banyak juga di artikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan menurut Winardi optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan . secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks.[43]

Jadi, optimalisasi maknanya: langkah/metode untuk mengoptimalkan. Dalam hal penelitian ini tentu yang dimaksud adalah sebuah upaya, langkah/ metode yang di pakai dalam rangka mengoptimalkan fungsi pendampingan desa dalam pembagunan desa Sukorejo Kecamatan Karangbinagun kabupaten Lamongan.

---

[42] Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994) Hal. 800
[43] Winardi, *Azas-Azas Marketing*, (Bandung, Alumni, 1996), Hal. 363



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Kebijakan Publik

### 1. Pengertian Kebijakan Publik

Penggunaan istilah kebijakan *(policy)* seringkali dipertukarkan dengan istilah-istilah lain, seperti tujuan *(goals)*, program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar. Bagi para pembuat kebijakan (policy makers) istilah-istilah tersebut tidak akan menimbulkan masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama. Namun, bagi orang-orang yang berada di luar struktur pengambilan kebijakan, istilah-istilah tersebut mungkin akan membingungkan.[44]

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.[45] Pengertian mengenai Kebijakan atau *policy* berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrumen untuk mengatur penduduk dari atas ke bawah.[46]

Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut. Siapa yang menyimpang dari

---

[44] Arifin Tahir, *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan pemerintah Daerah*, (Bandung : ALFABETA, 2014) Hal 20

[45]http://kbbi.web.id/bijak (Jumat, 29 juni 2018, 22.24)

[46]Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2012), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aturan kebijakan akan dikenai sanksi atau hukuman. Singkatnya, kebijakan merupakan *"model for behavior"* dalam rangka untuk menciptakan *"model for behavior".* Dilihat dengan cara seperti ini, maka berarti kebijakan merupakan suatu produk kultural. Sementara itu, perancangan dan implementasinya adalah suatu proses kultural, tepatnya lagi, proses perubahan kultural yang dilakukan secara terencana dengan tujuan yang disadari *(planned sociocultural change).*[47]

Syafie, mengemukakan bahwa kebijakan *(policy)* hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan *(wisdom)* karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, syafie mendefinisikan kebijakan publik sebagai semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya pemecahan, mengurangi dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya yaitu menjadi penganjur, inovasi dan terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.[48]

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan

[47] Ibid,..
[48] Inu Kencana Syafie, *Ilmu Administrasi Publik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta), hal. 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.[49]

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai *"is whatever government choose to do or not to do"* (apapaun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan "tindakan" dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Terdapat beberapa ahli yang mendefiniskan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Planosebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh

[49] Hesel Nogi Tangkilisan. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. (Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.2003) Hal 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah kebijakan lahir karena ada suatu masalah yang hendak dipecahkan. Oleh karena itu, kebijakan merupakan alat atau cara untuk memecahkan masalah yang sudah ada sehingga dalam hal ini yang menjadi dasar pembuatan kebijakan adalah masalah. Jika tidak ada masalah tidak perlu ada suatu kebijakan baru.

Terbitnya kebijakan tentang pendamping desa diharapkan dapat melaksanakan program pembangunan sesuai dengan undang-undang. Adanya pendamping desa ini diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat dalam bentuk pembangunan yang ada di desa. Dalam hal ini Pemerintah serta pendamping desa dapat bekerja sama dalam implementasi kebijakan sehingga pembangunan yang ada di desa dapat tersalurkan sehingga Kesejahteraan desa dapat terwujud apabila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelenggaraan tersebut dapat diatur, diurus dan dikelola sendiri sebebas-bebasnya dan seluas-luasnya. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan harus mengejawantahkan konsep otonomi dengan baik dan serius sehingga tujuan ideal kesejahteraan dapat terwujud dan dirasakan oleh masyarakat.[50] Serta pemerintah desa merupakan salah satu lembaga penyelenggaraan Negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, sehingga pemerintah desapun mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang efektif, efisien, terbuka dan bertanggung jawab kepada masyarakat.[51]

**2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik**

Dalam proses pembuatan kebijakan publik, dibagi dalam beberapa tahapan yang dikelompokkan untuk memudahkan dalam menganalisis suatu kebijakan publik. Tahapan-tahapan tersebut terhadap kebijakan publik dapat dikelompokkan oleh menurut Willian Dunn, sebagai berikut:[52]

---

[50] Abdul Chalik, Muttaqin Habibullah. *Pelayanan Publik Tingkat Desa*, (Yogyakarta: Interpena, 2015), hal 17

[51] Abdul Chalik, *Laporan Survey kompetisi Pelayanan Publik Tingkat Desa The Sunan Giri Award Tahun 2016*, (Gresik;2016) hal 19

[52] Willian Dunn, *Analisis Kebijakan Publik,* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999) hal 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Gambar 2.1 Alur Proses Kebijakan Publik**

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli yang mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan pembagian ini adalah untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik. Winarno dalam bukunya yang berjudul kebijakan publik teori, proses dan studi kasus , membagi tahapan kebijakan sebagai berikut:[53]

a. Tahap Penyusunan Agenda

Pada tahap ini para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetesi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam

[53]Budi Winarn, *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: CAPS, 2014), 35-37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk kedalam agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap formulasi kebijakan

Pada tahap ini, masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan akan dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah tadi didefinisikan kemudian dicarikan pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah berasal dari dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Pada tahap ini masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil guna memecahkan masalah. Pada tahap ini pula, para aktor akan "bermain" untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d. Tahap Implementasi kabijakan

Suatu program akan hanya menjadi catatan-catatan elite, jika program tersebut tidak diimplementasikan/dijalankan. Oleh karena itu,keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana , namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukan lah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa dalam sebuah kebijakan harus memulai dengan beberapa tahapan yang harus dilalui. Hingga nantinya dapat diketahui apa dan bagaimanakah sebuah kebijakan dihasilkan serta sejauh mana dampaknya berpengaruh kepada sasaran kebijakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### 3. Ciri-ciri Kebijakan Publik

David Easton dalam Wahab, mengemukakan bahwa ciri-ciri khusus kebijakan pemerintah bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan oleh apa yang beliau sebut sebagai orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik. Dari penjelasan Easton di atas membawa implikasi tertentu terhadap konsep kebijakan, yakni:[54]

e) Kebijakan lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai prilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan.

f) Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas, tindakan-tindakan yang saling terkait dan yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat.

g) Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.

h) Kebijakan pemerintah mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuk yang positif, kebijakan mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu. Sementara dalam bentuk yang negatif, kemungkinan meliputi keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru diperlukan.

Selanjutnya isi/konten kebijakan terdiri dari Pihak yang kepentingannya dipengaruhi, Jenis manfaat yang bisa dipengaruhi, Jangkauan

[54]http://www.artikelsiana.com/2015/11/kebijakan-publik-pengertian-contoh-ciri.html, diakses pada Rabu, 15 November 2017, pukul 08.51 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perubahan yang ditetapkan, Letak pengambilan keputusan pelaksana-pelaksana program , Sumber-sumber yang dapat disediakan. Berdasarkan poin-poin tersebut maka ciri dari kebijakan adalah kebijakan dihadirkan dalam rangka mewujudkan sebuah tujuan baik yang berbentuk positif maupun negatif yang hakikatnya terdiri atas beberapa tindakan yang sating berkaitan satu sama lain dan dilaksanakan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.

**4. Efektivitas Kebijakan Publik**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Menurut Gedeian, mendefinisikan efektivitas adalah *That is, the greater the extent it which an organization`s goals are met or surpassed, the greater its effectiveness* (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas).[55]

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan dari pada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar dari pada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. Menurut Dunn, menyatakan bahwa: Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil

[55]http://www.psychologymania.com/2012/12/definisi-efektivitas.html, diakses pada Jum'at, 29 juni 2018 pukul 08.54 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya.

Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu. Menurut Mahmudi, mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.[56].

Efektifitas memiliki pengertian yang berbeda dengan efisiensi. Seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Syamsi dalam bukunya "pokok-pokok organisasi dan managemen" bahwa

> "efektifitas (hasil guna) ditekankan pada efeknya, hasilnya dan kurang memperdulikan pengorbanan yang perlu diberikan untuk memperoleh hasil tersebut. Sedangkan efisiensi (daya guna), penekanannya disamping pada hasil yang ingin dicapai, juga besarnya pengorbanan untuk mencapai hasil tersebut perlu diperhitungkan[57]

Berdasarkan pendapat diatas, terdapat perbedaan antara efektifitas dan efisiensi. Perbedaan dari efektifitas dan efisiensi yaitu efektifitas menekankan

[56]Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal.92

[57] Ibnu Syamsi, Pokok- Pokok Organisasi dan Managemen , (Jakarta: Bina Karsa, 1988), hal. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada hasil atau efeknya dalam mencapai tujuan, sedangkan efisiensi cenderung pada penggunaan sumber daya dalam pencapaian tujuan.

Selanjutnya mengenai efisiensi, Prajudi Admosudiharjo menyatakan sebagai berikut "kita berbicara tentang efisiensi bila mana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga tujuan akan tercapai[58].

Berkaitan dengan pengertian efektivitas yang penulis uraikan di atas, maka penulis ingin mengetahui (bagaimana tenaga pendamping lokal desa dalam mengoptimalkan pembangunan desa sehingga dalam pelaksanaan pembangunan bisa efektif serta efisien

## C. Pembangunan Desa

Menurut Sondang P.Siagian, administrasi pembangunan meliputi dua pengertian yaitu tentang administrasi dan tentang pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan di selenggarakan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sedangkan pembangunan adalah serangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana

[58] Prajudi Admosudiharjo, *Managemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1987 )hal 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bagsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. [59]

Menurut Syamsi Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri pembangunan adalah proses perubahan sistem yang di rencanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernis pembagunan dan kemajua sosial ekonomis, konsep pembagunan itu merupakan kunci pembuka bagi pengertian baru tentang hakekat fungsi administrasi pada setiap negara dan sifat dinamis. Pembangunan akan dapat berjalan lancar, apabila disertai denga administrasi yang baik.[60]

Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang berkelanjutan dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang di anggap lebih baik. Sedangkan menurut Sondang P.siagian pembagunan merupakan suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana serta sadar yang ditempuh oleh suatu negara dalam rangka pembinaan bangsa.

Pembangunan terdiri dari pembagunan fisik dan non fisik. Pembagunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh masyarakat atau pembagunan yang tampak oleh mata pembagunan fisik misalnya berupa infrastruktur, bagunan, fasilitas umum. Sedangkan pembagunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama contoh dari

[59] Sondang P.Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara 2001) hal 4

[60] Syamsi Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, *Keuangan Negaradan Analisis Kebijakan Utang Luar Negri*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006) hal 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembagunan non fisik adalah berupa peingkatan perekonomian rakyat desa, peningkatan kesehatan masyarakat.[61]

Sedangkan menurut Kartasasmita pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan, pembinaan, dan pengawasan agar dapat di tingkatkan kemapuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraan.[62]

Pembagunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dan merupakan usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarka potensi dan kemampuan desa. Dalam hal ini dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan[63]

Pembagunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam konteks pembagunan nasional karena mencakup bagian terbesar dari wilayah nasional. Pembagunan masyarakat desa harus ditingkatkan untuk menunjang pembangunan desa. Pembagunan masyarakat desa dapat dilakukan melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia yang ada di pedesaan

---

[61] Mudrajad Kuncoro, *Dasar- Dasar Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta; UPP STIM YKPN, 2010 ) hal. 20

[62] Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta: Pustaka CIDESINDO,2001) hal 66

[63] Rahardjo Adisasmita, *Membangun Desa Partisipatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) hal. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga kreatifitas dan aktifitasnya dapat semakin berkembag serta kesadaran lingkungannya semakin tinggi.

Pemerintah desa mempunyai peranan yang sangat berpengaruh terutama dalam upaya untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di pedesaan, yang dilakukan melalui penyampaian pesan-pesan pembagunan. Pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat desa diwujudkan dalam bentuk pengerahan dan pemanfaatan dana dan daya yang ada dalam masyarakat untuk meningkatkan kegiatan pembagunan di daerah pedesaan.

Berdasarkan pengertian mengenai pembangunan desa tersebut diatas, dapat dimaknai bahwa pembagunan desa merupakan sebuah konsep pembangunan yang berbasis pedesaan dengan tetap memperhatikan ciri khas sosial budaya masyarakat yang tinggal di kawasan pedesaan. Pembangunan desa di harapakan menjadi solusi bagi perubahan sosial masyarakat desa dan menjadikan desa sebagai basis perubahan.

Tujuan dari pembangunan desa di bagi mejadi 2 yaitu pembangunan desa jangka panjang dan pembangunan desa jangka pendek. Tujuan desa jangka panjang yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan mendapatkan berdasarkan pada pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia, dan yang secara tidak langsung ialah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembagunan nasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan tujuan pembagunan jangka pendek yaitu meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam.[64]

Pembangunan desa secara spasial dapat dirumuskan yaitu terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri. Berwawasan lingkungan, selaras, serasi dan bersinergi dalam kawasan pedesaan lain melalui pembagunan komprehensif dan berkelanjutan untuk terwujudnya masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera.[65]

Pada hakekatnya tujuan umum dari pembagunan desa adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui pencapaian kemajuan sosial dan ekonomi secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prisip keadilan bagi masyarakat secara keseluruan. Dari megenai pengertian pembagunan desa dapat dimaknai bahwa tujuan dari pembangunan desa suatu usaha yang dilakukan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tantang desa menerangkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa.[66] Pembangunan desa bertujuan untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan daya

---

[64] Rahardjo Adisasmita, *Pembagunan Pedesaan; Pendekatan Partisipatif,Tipologi Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan,* (Yogyakarta: Graha Ilmu,2013) hal 57

[65] Rahardjo Adisasmita, *Pembaguna Pedesaan Dan Perkotaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) hal 3

[66] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saing desa.[67] rencana kerja pemerintah tahun 2015 mengamanatkan banyak percepatan pembangunan desa dilaksanakan melalui implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki tugas dan fungsi menjalankan urusan pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.[68] dan upaya yang dilakukan untuk mendukung kelancaran implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu pemerintah melakukan pendamping dengan dibantu pendamping professional yang berpengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat dan dibidang pembangunan desa.

Pendamping desa ini diatur dalam peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa.[69]. Pendamping desa ini dilaksanakan agar adanya pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan di desa dapat tercapai dengan cepat.

Dalam pengertian pembangunan menurut para ahli dan dari undang-undang dapat disimpulkan adanya pendamping desa dituntut untuk mempercepat pembangunan yang ada di desa, dan melaksanakan tujuan agar dapat tercapai. Antara pemerintah desa, pendamping desa serta masyarakat dapat bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di desa. karena

[67] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 7 ayat 3 Penataan desa
[68] Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa
[69] Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah desa merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk kegiatan pelayanan publik.

**D. Fungsi Pendamping Desa dalam Pembangunan Desa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa pada pasal 12, Tupoksi dari Pendamping Lokal Desa yaitu:[70]

j) Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sebagai tenaga ahli, pendampingan dalam peningkatan penyelengaraan pemerintahan desa harus dilaksanakan agar pembangunan desa serta kemajuan desa dapat terwujud.

k) Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

l) Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

m) Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok- kelompok masyarakat desa. Pendampingan desa sangat berpengaruh dalam pendampingan kelompok- kelompok yang ada di dalam masyarakat. Kelompok-kelompok

[70]Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa pasal 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ada harus diorganisasi agar dapat berkembang dan dapat memajukan desa.

n) Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru. Peningkatan sumber daya manusia merupakan hal penting untuk terwujudnya pembangunan desa yang partisipatif, oleh karena itu pendamping desa harus mampu untuk meningkatkan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat.

o) Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif. Tidak hanya pendampingan kepada aparatur desa, pendampingan desa juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan yang berwawasan lingkungan. Karena pembangunan desa dapat terwujudjika dalam pelaksanaannya melibatkan seluruh aparatur desa dan seluruh masyarakat.

p) Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

q) Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor agar pembangunan desa dapat terwujud dalam pelaksanaannya tidak hanya melibatkan satu sektor namun harus ada beberapa sektor baik dari sektor ekonomi maupun sektor keamanan nasional.

r) Mengoptimalkan aset lokal desa secara amansipatoris. Aset lokal desa dalam penunjang pembangunan desa harus digunakan dengan optimal dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bijak. Oleh karena itu optimalisasi aset lokal desa oleh pendamping desa diperlukan untuk penunjang pembangunan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tugas Pendamping Desa dapat dimaknai bahwa, pendampingan terhadap desa pada prinsipnya adalah upaya untuk menggerakkan potensi yang ada di desa sehingga desa mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk perubahan-perubahan ke arah lebih baik dari sisi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Karena itu pendampingan desa tidak bisa hanya dilihat dan dimaknai sebagai aktivitas membantu desa menjalankan aspek-aspek teknokratis dan administratif saja. Lebih dari itu, pendampingan desa merupakan aktivitas mengubah nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa agar bisa diterjemahkan dalam perilaku keseharian di desa.

Dari tugas pendamping lokal desa yang Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

**Gambar 2.2 : Tahapan dalam Pembangunan Desa**

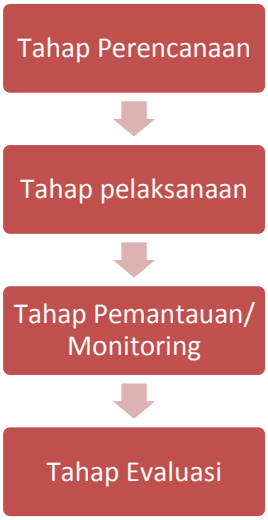


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**1. Tahap Perencanaan**

Perencanaan merupakan sebuah proyeksi terhadap kegiatan apa saja yang akan dilakukan kedepannya. Proyeksi yang dibuat harus melalui pertimbangan yang matang berdasarkan kebutuhan yang ada. Oleh sebab itu pembangunan desa harus melalui tahap perencanaan terlebih dahulu agar berjalan dengan baik dan sejalan dengan yang dijelaskan dalam undangan-undang pasal 79 UU Desa tentang perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada rencana pembangunan kabupaten/kota.[71] Perencanaan desa dilaksanakan dengan menyusun dokumen :

a) Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 tahun
b) Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 tahun

Kedua dokumen perencanaan ini ditetapkan dengan peraturan desa.

Pasal 79 ayat 4 dan 5 menyatakan bahwa peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa merupakan satu- satunya dokumen perencanaan di desa dan merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa.

[71] Undang-Undang Tentang Desa Pasal 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dikaitkan dengan perencanaan dan anggaran dana desa maka terdapat beberapa tahapan didalamnya, meliputi :

**Gambar 2.3: Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa**

**2. Tahap Pelaksanaan**

Pelaksaanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya , dan kapan waktu dimulainya. [72] Mengacu pada konsep yang dijelaskan

[72] Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, ( Yogyakarta: Graha Ilmu 2011) hal. 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka pelaksanaan harus sejalan dengan perencanaan dana desa yang telah ditetapkan sebelumnya.

**3. Tahap Pemantauan (Monitoring) dan Evaluasi**

Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan yang sangat penting dalam proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, karena dengan adanya monitoring dan evaluasi, maka akan diketahui sejauh mana efektifitas dan efisien program social yang diberikan. Menurut Marjuki (1996) didalam Suharto pemantauan dapat disama artikan dengan *monitoring*, maka pengertian dari *monitoring* adalah serangkaian aktivitas pemantauan secara terus menerus terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.[73] Adapun tujuan dari adanya pemantauan (*monitoring*) adalah untuk:

a) Mengetahui bagaimana masukan (*inputs*) sumber-sumber dalam rencana digunakan
b) Bagaimana kegiatan-kegiatan dalam implementasi dilaksanakan
c) Apakah rentang waktu implementasi terpenuhi secara tepat atau tidak.
d) Apakah setiap aspek dalam perencanaan dan implementasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Mengacu pada konsep diatas, maka program dalam pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan untuk di pantau kelangsungannya. Agar kebijakan yang telah dibuat dapat berjalan sesuai dengan aturan.

[73] Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung : Refika Aditama 2006) hal 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# *SETTING* PENELITIAN

## A. Deskripsi Desa Sukorejo

### 1) *Aspek Geografi*

Secara Geografis desa sukorejo terletak pada posisi 7º 21′ - 7° 31′ lintang selatan dan 110º 10′ -111° 40 Bujur Timur. Secara topografi desa Sukorejo adalah merupakan daerah dataran rendah (Istilah di Lamongan daerah Bonorowo)

Menurut data BPS Kabupaten Lamongan, selama tahun 2009 curah hujan di desa Sukorejo rata-rata mencapai 2.400 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405.04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2004-2009

Iklim desa Sukorejo, sebagaimana desa-desa lain di wilayah indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal ini mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di desa Sukorejo.

Secara administratif, desa Sukorejo terletak di wilayah kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan desa tunjung mekar kecamatan kalitengah. Di sebelah barat berbatasan dengan desa Waruk Kecamatan Karangbinagun, disisi Selatan berbatasan dengan desa Kepudi Bener kecamatan Turi, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan desa Karanganom kecamatan Karangbinangun. Jarak tempuh desa



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sukorejo ke ibu kota kecamatan adalah 10 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten adalah 20 km, yang yang dapat ditempuh oleh waktu sekitar 60 menit.

2) *Aspek Demografi*

Berdasarkan data administrasi desa Sukorejo tahun 2017 yang ada, jumlah penduduk desa Sukorejo adalah 2,847 jiwa, yang terdiri dari 1.327 jiwa laki-laki dan 1.520 jiwa perempuan, dengan jumlah Kepala Keluarga sebayak 500 KK, lebih rinci seperti yang tertera di bawah ini;

**Tabel 3.1 : Jumlah penduduk menurut golongan usia**

| No | Golongan Umur | Jumlah (orang) |
|---|---|---|
| 1. | 0 bulan – 12 bulan | 36 |
| 2. | 1 tahun - 4 tahun | 138 |
| 3. | 5 tahun- 6 tahun | 76 |
| 4. | 7 tahun – 12 tahun | 225 |
| 5. | 13 tahun – 15 tahun | 118 |
| 6. | 16 tahun – 18 tahun | 117 |
| 7. | 19 tahun – 25 tahun | 255 |
| 8. | 26 tahun – 35 tahun | 413 |
| 9. | 36 tahun – 45 tahun | 431 |
| 10 | 46 tahun – 50 tahun | 166 |
| 11 | Di atas 50 tahun | 872 |
| | **JUMLAH** | **2.847** |

Sumber: RPJM Desa Sukorejo tahun 2014-2019, data telah diolah

Jumlah penduduk di lihat dari tingkat pendidikan, pendidikan adalah suatu hal yang penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendrongkak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Prosentase tingkat pendidikan desa Sukorejo dapat di lihat dalam tabel berikut.

**Tabel 3.2 : Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah (orang) |
|---|---|---|
| 1. | Belum sekolah | 97 |
| 2. | Usia 7 tahun – 45 tahun tidak pernah sekolah | 32 |
| 3. | Sekolah SD tapi tidak lulus | 27 |
| 4. | Tamat SD/Sederajat | 63 |
| 5. | Tamat SLTP/Sederajat | 55 |
| 6. | Tamat SLTA/Sederajat | 51 |
| 7. | Tamat D1, D2, D3 | 50 |
| 8. | Sarjana/ S-1 | 21 |
| 9. | Pernah Khursus | 25 |

Sumber: RPJM Desa Sukorejo tahun 2014-2019, data telah diolah

*3) Aspek Pemerintahan*

Pemerintah desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kantor desa buka setiap hari kerja, sedangkan Balai Desa digunakan untuk kegiatan pertemuan atau rapat desa. Adapun desa tersebut telah mempunyai lembaga pemerintahan desa dari aparat desa Karanganom:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Kepala Desa

b) Unsur Staf terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pemerintahan dan Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat

c) Unsur pelaksana Teknis Lapangan terdiri dari Kepala Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, Kepala Urusan Keuangan , Kepala Urusan Umum, Unsur Pelaksana Kewilayahan terdiri dari Kepala-kepala Dusun.

**Gambar 3. 3 : Struktur Organisasi Desa Sukorejo**

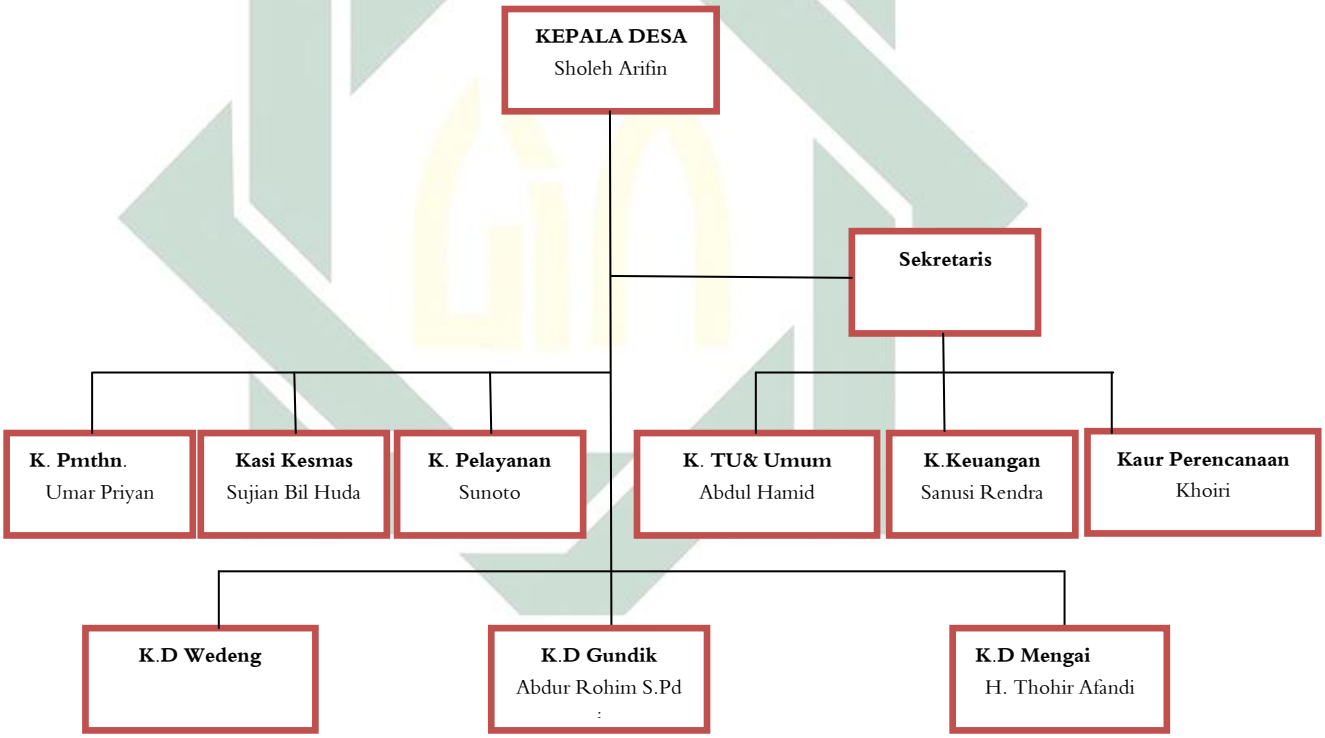


Mengacu pada gambar diatas merupakan susunan organisasi pemerintah desa yang didalamnya terdapat posisi dari pejabat desa. Semua posisi tersebut memiliki peran masing-masing dalam pelaksanaan pemerintahan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan. Seperti halnya ada program pembangunan yang ada di desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi tanggung jawab dari pejabat desa yang menjadi salah satu aktor penentu dari implementasi kebijakan atau dari program yang sedang di jalankan.

Sedangkan lembaga yang ada di desa Sukorejo dapat dilihat di tabel berikut :

**Tabel 3. 4: Lembaga Desa Sukorejo**

| No | Lembaga | Pengurus dan Anggota | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| | | L | P | |
| 1. | BPD | 11 | | 11 Orang |
| 2. | LPMD | 8 | - | 8 Orang |
| 3. | PKK | | 58 | 58 Orang |
| 4. | KPMD | 2 | | 2 Orang |
| 5. | KARTAR | 33 | 22 | 55 Orang |

Sumber: RPJM Desa Sukorejo tahun 2014-2019, data telah diolah

Lembaga tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai berikut

a) BPD yang tugasnya sebagai mitra kerja pemerintah Desa
b) LPM yang mempunyai tugas membentu perencanaan dan pelakanaan pembangunan desa
c) PKK yang mempunyai tugas membantu menaambah pendapatan keluarga melalui UP2K, P4K, simpan pinjam kelompok perempuan PKK.
d) KPMD merupakan kader desa yang berfungsi sebagai penggerak pembangunan desa
e) Karang Taruna (KARTAR) dari kalangan remaja desa melalui kegiatan-kegiatan social dan edukatif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Lembaga Keagamaan sudah ada dengan kegiatan yasinan, tahlil, dan arisan yang dilakanakan pada setiap malam jum,at.

Berangkat dari data diatas merupakan kelembagaan yang terdapat di desa Karanganom selaku pihak eksternal desa. Untuk itu semuanya harus dapat sinergi dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Khususnya dalam aspek pembangunan dan pemberdayaan desa.

4) *Aspek Ekonomi*

Secara umum perekonomian warga masyarakat desa Sukorejo dapat teridentifikasi dari jenis mata pencahariannya yang mencakup ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, indrustri dan lain-lain.

Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

**Tabel 3.5 : Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Sukorejo**

| No | Mata Pencaharian | Jumlah (orang) |
|---|---|---|
| 1. | Petani | 450 |
| 2. | Buruh Tani | 875 |
| 3. | Buruh Swasta | 28 |
| 4. | Pegawai Negri Sipil | 11 |
| 5. | Guru Negri | 5 |
| 6. | Guru Swasta | 53 |
| 7. | ABRI | 1 |
| 8. | Pedagang | 67 |
| 9. | Peternak | 11 |
| 10. | Tukang Kayu/Batu | 67 |
| 11. | Karyawan Swasta | 13 |
| 12. | Montir | 4 |
| 13. | Perawat/Bidan | 3 |
| 14. | Dokter | - |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | |
|---|---|---|
| 15. | Sopir | 5 |
| 16. | Penjahit | 15 |
| 17. | Pengrajin | 10 |
| 18. | Jasa Angkut | 7 |
| 19. | Pensiunan | 5 |

Sumber: RPJM Desa Sukorejo tahun 2014-2019, data telah diolah

Dari data diatas profesi atau mata pencaharian penduduk desa Sukorejo mayoritas adalah sebagai buruh tani atau petani. Terbukti dari jumlah 875 orang yang bekerja sebagai buruh tani.

5) *Aspek Sosial-Budaya*

Mengenai keadaan sosial dan budaya di desa Sukorejo terbilang masih melestarikan tradisi-tradisi yang diwarisi oleh nenek moyang. Beberapa tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakan desa Sukorejo:

1) Tingkepan adalah sebuah ritual keagamaan yang dilakukan untuk seorang ibu yang sedang hamil. Ritual ini biasanya dilakukan saat usia kehamilan menginjak bulan ke 7. Tingkepan selalu dilakukan oleh masyarakat desa Sukorejo yang sedang hamil, guna mendoakan agar jabang bayi yang lahir kelak dapat menjadi anak yang berbakti dan berguna bagi nusa bangsa dan agama.
2) Megengan, yakni sebuah upacara yang sudah ada sejak dulu atau tradisi untuk mendoakan arwah keluarga yang sudah meninggal dunia, dan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadhan. Acara ini dilakukan sebelum menginjak bulan Romadhan. Masyarakat desa Sukorejo dan tidak pernah lupa melakukan tradisi seperti ini. Biasanya megengan ini dilaksanakan di masjid atau mushola di desa Sukorejo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan desa Karanganom, setiap orang membawa berkatan (berupa makanan) masing-masing untuk disedekahkan kepada orang lain yang menghadiri acara.

3) Dalam tradisi perkawinan, masyarakat di desa Sukorejo sama dengan sistem perkawinan dengan umumnya. Orang yang melamar pertama kali adalah pihak laki-laki lalu dilanjutkan oleh pihak perempuan untuk melanjutkan dan menentukan tanggal pernikahannya yang biasa disebut (mbalekno lamaran).
4) Berziarah ke makam-makam para wali atau makam saudara, keluarga, dan juga para tokoh agama yang sudah meninggal. Berziarah kubur adalah suatu tradisi yang turun temurun dilakukan oleh masyarakat desa Sukorejo selain itu mereka juga malakukan slametan atau tahlilan atau nderes (kirim doa) selama 7 hari 7 malam untuk orang yang baru meninggal dunia.

Itulah beberapa tradisi yang masih terus dilestarikan oleh masyarakat desa Sukorejo tradisi dan budaya yang ada di desa tersebut tetap memegang teguh ajaran islam, karena mayoritas masyarakat di desa tersebut adalah beragama Islam. Adapun aspek organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan di desa Sukorejo dapat dilihat di table berikut :

**Tabel 3.6 : Daftar Sumber Daya Sosial Budaya di Desa Sukorejo**

| No | Uraian Kelembagaan/Organisasi | Volume | Satuan |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Organisasi Keagamaan** | | |
| | a. Nahdlatul Ulama’ | 1 | Kelompok |
| | b. Fatayat | 1 | Kelompok |
| | c. Muslimat | 1 | Kelompok |
| | d. Jam’iyah Tahlil | 12 | Kelompok |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| | e. Jam'iyah Istighosah | 5 | Kelompok |
| **2.** | **Organisasi kepemudaan** | | |
| | a. Karang Taruna | 3 | Kelompok |
| | b. Remaja Masjid | 3 | Kelompok |
| **3.** | **Lain-lain** | | |
| | a. | | |
| | b. | | |

Sumber: RPJM Desa Sukorejo tahun 2014-2019, data telah diolah

## B. Deskripsi Desa Karanganom

### *1) Aspek Geografi*

Secara umum letak geografis Desa Karanganom terletak pada garis 7º 21' - 7° 31' sampai dengan 110º 10' -111° 10' Lintang Selatan dan diantara garis bujur timur 112° 4' 4" sampai dengan 112° 33'12". Desa Karanganom memiliki luas wilayah kurang lebih 144,980 Ha. Dan bisa dibagi menjadi tiga karakteristik wilayah daratanya yaitu : sawah tambak 95,980 Ha, Permukiman 35 Ha dan Lainnya 14 Ha.

Batasan wilayah administrasi Desa Karanganom Kec. Karangbinangun adalah sebagai berikut :

Batas Wilayah

- Sebelah Utara : Desa Mayong Kec. Karangbinangun
- Sebelah Selatan : Desa Kepudibener Kec. Turi
- Sebelah Barat : Desa Sukorejo Kec. Karangbinangun
- Sebelah Timur : Desa Somowinangun Kec. Karangbinangun

Desa Karanganom terdiri dari 2 (dua) Dusun dengan 2 kepala Dusun, 4 (empat) Rukun Warga dan 8 (delapan) Rukun Tetangga sedang kondisi Topografi Desa Karanganom Kec. Karangbinangun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah datar dan termasuk agak rendah dibanding dengan desa Lain jika ditinjau dari jarak ke IKK. Dusun – Dusun di wilayah desa Karanganom mudah diakses untuk menuju dusun lainnya walaupun hanya ada satu jalan poros desa, Karena letak dusun satu dengan lainnya tidak jauh.

2) *Aspek Demografi*

Berdasarkan data Laporan Kependudukan desa Karanganom Tahun 2017, dapat diketahui bahwa perkembangan penduduk desa Karanganom selama satu tahun terakhir senantiasa berkembang Jumlah penduduk desa Karanganom dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.7: Data Kependudukan Desa Karanganom**

| **Bulan** | **Penduduk** | | **Jumlah** |
|---|---|---|---|
| | **Laki-Laki** | **Perempuan** | |
| Januari | 989 | 1,200 | 2,189 |
| Pebruari | 989 | 1,200 | 2,189 |
| Maret | 989 | 1,199 | 2,188 |
| April | 989 | 1,199 | 2,188 |
| Mei | 989 | 1,199 | 2,188 |
| Juni | 989 | 1,199 | 2,188 |
| Juli | 988 | 1,200 | 2,188 |
| Agustus | 988 | 1,200 | 2,188 |
| September | 988 | 1,198 | 2,186 |
| Oktober | 988 | 1,199 | 2,187 |
| Nopember | 986 | 1,199 | 2,185 |
| Desember | 985 | 1,200 | 2,185 |

Sumber: RPJM Desa Karanganom tahun 2014-2019, data telah diolah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*3) Aspek Pemerintahan*

Pemerintah Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kantor desa buka setiap hari kerja, sedangkan Balai Desa digunakan untuk kegiatan pertemuan atau rapat desa. Adapun desa tersebut telah mempunyai lembaga pemerintahan desa dari aparat desa Karanganom:

a. Kepala Desa
b. Unsur Staf terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pemerintahan dan Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat
c. Unsur pelaksana Teknis Lapangan terdiri dari Kepala Seksi Pemerintahan Seksi Pembangunan, Kepala Urusan Keuangan , Kepala Urusan Umum, Unsur Pelaksana Kewilayaan terdiri dari Kepala-kepala Dusun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Gambar 3. 8: Struktur Organisasi Desa Karanganom**

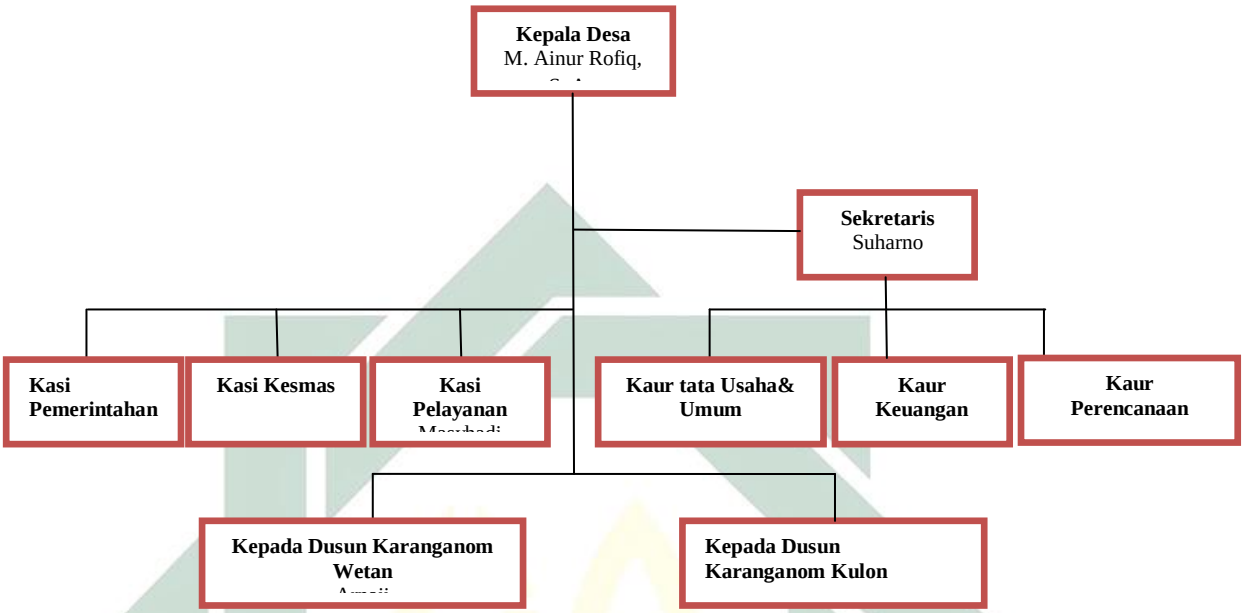


Mengacu pada gambar diatas merupakan susunan organisasi pemerintah desa yang didalamnya terdapat posisi dari pejabat desa. Semua posisi tersebut memiliki peran masing-masing dalam pelaksanaan pemerintahan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan. Seperti halnya ada program pembangunan yang ada di desa menjadi tanggungjawab dari pejabat desa yang menjadi salah satu aktor penentu dari implementasi kebijakan atau dari program yang sedang dijalankan.

Dari susunan organisasi pemerintah desa yang ada, pembangunan desa tetap berjalan dengan baik meski yang menjalankan hanya beberapa perangkat desa, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Pelayanan, serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepala dusun Karanganom. Dalam tatanan kelembagaan, sistem yang berjalan di Desa Karanganom kurang maksimal karena banyak kekosongan dalam sistem organisasi desa sehingga perangkat desa ada yang tidak menjalankan peran dan tugasnya.

Sedangkan lembaga yang ada di desa Sukorejo dapat dilihat ditabel berikut :

**Tabel 3.9: Lembaga Desa Karanganom**

| No | Lembaga | Pengurus dan Anggota | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| | | L | P | |
| 1. | BPD | 7 | | 7 Orang |
| 2. | LPMD | 5 | | 5 Orang |
| 3. | PKK | | 43 | 43 Orang |
| 4. | KPMD | 2 | | 2 Orang |
| 5. | KARTAR | 21 | 14 | 35 Orang |

Sumber: RPJM Desa Karanganom tahun 2014-2019, data telah diolah

Lembaga tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai berikut

a) BPD yang tugasnya sebagai mitra kerja Pemerintah Desa
b) LPM yang mempunyai tugas membentu perencanaan dan pelakanaan pembangunan desa
c) PKK yang mempunyai tugas membantu menaambah pendapatan keluarga melalui UP2K, P4K, simpan pinjam kelompok perempuan PKK.
d) KPMD merupakan kader desa yang berfungsi sebagai penggerak pembangunan desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Karang Taruna (KARTAR) dari kalangan remaja desa melalui kegiatan-kegiatan social dan edukatif

f) Lembaga Keagamaan sudah ada dengan kegiatan yasinan, tahlil, dan arisan yang dilakanakan pada setiap malam jum,at.

Berangkat dari data diatas merupakan kelembagaan yang terdapat di desa Karanganom selaku pihak eksternal desa. Untuk itu semuanya harus dapat sinergi dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Khususnya dalam aspek pembangunan dan pemberdayaan desa.

4) *Aspek Ekonomi*

Sedangkan Jumlah penduduk di lihat menurut mata pencaharian, Sumber penghasilan utama penduduk di desa Karanganom ini adalah pertanian.

Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

**Tabel 3. 10 : Jumlah penduduk desa Karanganom menurut mata pencaharian**

| No | Mata Pencaharian | Volume | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1. | Pertanian/Perikanan | 150 | Keluarga |
| 2. | Perdagangan Besar/Rumah Makan dan Eceran | 30 | KK |
| 3. | Angkutan dan pergudangan | 20 | Orang |
| 4. | Jasa | 5 | Orang |
| 5. | Lainnya | | |

Sumber: RPJM Desa Karanganom tahun 2014-2019, data telah diolah

5) *Aspek Sosial-Budaya*

Mengenai keadaan sosial dan budaya di desa Karanganom terbilang masih melestarikan tradisi-tradisi yang di warisi oleh nenek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

moyang. Beberapa tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakan Desa Karanganom dan Desa Sukorejo:

1. Tingkepan adalah sebuah ritual keagamaan yang dilakukan untuk seorang ibu yang sedang hamil. Ritual ini biasanya dilakukan saat usia kehamilan menginjak bulan ke 7. Tingkepan selalu dilakukan oleh masyarakat desa Karanganom yang sedang hamil, guna mendoakan agar jabang bayi yang lahir kelak dapat menjadi anak yang berbakti dan berguna bagi nusa bangsa dan agama.
2. Megengan, yakni sebuah upacara yang sudah ada sejak dulu atau tradisi untuk mendoakan arwah keluarga yang sudah meninggal dunia, dan untuk menyambut datagnya bulan suci Ramadhan. Acara ini dilakukan sebelum menginjak bulan Ramadhan. Masyarakat desa Karanganom tidak pernah lupa melakukan tradisi seperti ini. Biasanya megengan ini dilaksanakan di masjid atau mushola di dan desa Karanganom, setiap orang membawa berkatan (berupa makanan) masing-masing untuk disedekahkan kepada orang lain yang menghadiri acara.

5) Dalam tradisi perkawinan, masyarakat di Desa Karanganom sama dengan sistem perkawinan dengan umumnya. Orang yang melamar pertama kali adalah pihak laki-laki lalu dilanjutkan oleh pihak perempuan untuk melanjutkan dan menentukan tanggal pernikahannya yang biasa di sebut (mbalekno lamaran).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Berziarah ke makam-makam para wali atau makam saudara, keluarga, dan juga para tokoh agama yang sudah meninggal. Berziarah kubur adalah suatu tradisi yang turun temurun dilakukan oleh masyarakat desa Karanganom, selain itu mereka juga malakukan slametan atau tahlilan atau nderes (kirim doa) selama 7 hari 7 malam untuk orang yang baru meninggal dunia.

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia yang terdiri dari berbagai budaya merupakan modal pendukung untuk mencapai suksesnya pembangunan di desa, terutama sebagai modal dasar untuk mempromosikan diri desa dalam kancah persaingan tingkat lokal, daerah, nasional maupun internasional. Sumber daya sosial budaya yang mencangkup organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan di desa Karanganom dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.11 : Daftar Sumber Daya Sosial Budaya di Desa Karanganom**

| No | Uraian Sumber Daya Sosial Budaya | Volume | Satuan |
|---|---|---|---|
| **1** | **Organisasi Keagamaan** | | |
| | a. Nahdlatul Ulama’ | 1 | Kelompok |
| | b. Fatayat | 1 | Kelompok |
| | c. Muslimat | 1 | Kelompok |
| | d. Jam’iyah Tahlil | 8 | Kelompok |
| | e. Jam’iyah Istighosah | 2 | Kelompok |
| **2** | **Organisasi Kepemudaan** | | |
| | a. Karang Taruna | 2 | Kelompok |
| | b. Remaja Masjid (Remas) | 2 | Kelompok |
| **3** | **Lain-lain** | | |
| | a. | | |
| | b. | | |

Sumber: RPJM Desa Karanganom tahun 2014-2019, data telah diolah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## C. Deskripsi Program dan Pendamping desa

1) Kriteria kompetensi Pendamping Desa

*a. Pendamping Lokal Desa (PLD)*[74]

a) Latar belakang pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat

b) Memiliki pengalaman kegiatan pembangunan desa dan/atau pemberdayaan masyarakat minimal 2 (dua) tahun.

c) Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan di desa

d) Memiliki pengalaman dalam pengembangan kapasitas, kaderisasi, dan pengorganisasian masyarakat

e) Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan desa

f) Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan

g) Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah desa

h) Mampu mengoperasikan computer minimal program office (Word, Excel, Power Point) dan internet

i) Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas

j) Pada saat mendaftar usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 45 (empat puluh lima) tahun

[74] *http://kemendesa.go.id/pendamping2016* di akses pada 29 juli 2018 pukul 21.01

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

k) Dilaraang menjadi pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan politik yang dapat mengganggu kinerja.

*b. Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP)*

a) Latar belakang pendidikan dari semua bidang ilmu minimal Diploma III (D-III)

b) Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan desa dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 4 (empat) tahununtuk D-III dan 2 (dua) tahun untuk Strata 1 (S-1))

c) Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan di desa.

d) Memiliki pengalaman dalam pengembangan kapasitas, kaderisasi dan pengorganisasian masyarakat

e) Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerjasana antar lembaga kemasyarakatan di tingkat desa

f) Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan desa

g) Memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbingan mencakup aspek fasilitasi penyelenggaraan pelatihan, fasilitasi penyelenggaraan pelatihan, fasilitasi kaderisasi an menguasai metodologi pendidikan orang dewasa.

h) Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan

i) Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j) Mampu mengoperasikan computer minimal program office (Word, Excel, Power Point) dan internet

k) Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas

l) Pada saat mendaftar usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 45 (empat puluh lima) tahun

m) Dilaraang menjadi pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan politik yang dapat mengganggu kinerja.

c. *Pendamping desa Tehnik Infrastruktur (PDTI)*[75]

a) Latar belakang pendidikan dari semua bidang ilmu minimal Diploma III (D-III)

b) Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan desa dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 4 (empat) tahununtuk D-III dan 2 (dua) tahun untuk Strata 1 (S-1))

c) Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan kegiatan infrastruktur di desa.

d) Memiliki pengalaman dalam pengembangan kapasitas, kaderisasi, dan pengorganisasian masyarakat

e) Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintah desa

f) Memiliki pengalaman memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kontruksi secara sederhan

[75] *http://kemendesa.go.id/pendamping2016* di akses pada 29 juli 2018 pukul 21.26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan

h) Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah desa dan masyarakat desa

i) Mampu mengoperasikan computer minimal program office (Word, Excel, Power Point) dan internet

j) Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas

k) Pada saat mendaftar usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 45 (empat puluh lima) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun

l) Dilaraang menjadi pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan politik yang dapat mengganggu kinerja.

2) Pembekalan dan Penguatan kapasitas pendamping desa

Salah satu faktor penentu keberhasilan pendampingan adalah kapasitas pendamping, khususnya PLD. Kapasitas dimaksud menunjuk pada kompetensi yang mencakup:

a) pengetahuan tentang perspektif dan kebijakan UU Desa,

b) keterampilan teknis dan fasilitasi pemerintah dan masyarakat Desa dalam mewujudkan tata kelola Desa yang baik, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kinerja pendamping profesional.[76]

Upaya meningkatkan kapasitas pendamping oleh Pemerintah, dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dilakukan melalui kebijakan pelatihan yang mencakup serangkaian kegiatan latihan, salah satunya adalah pelatihan pra tugas bagi pendamping, khususnya PLD, sebagai pembekalan agar dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya secara optimal.

Secara umum tujuan pelatihan pra tugas Pendamping Lokal Desa adalah untuk memberikan orientasi dan pembekalan agar siap secara mental, pengetahuan, dan keterampilan sebelum diterjunkan di lokasi tugas. Secara khusus pelatihan pra tugas Pendamping Lokal Desa bertujuan untuk:[77]

- Memberikan orientasi dan pembekalan kepada Pendamping Lokal Desa sebelum bertugas di lapangan;
- Meningkatkan pemahaman Pendamping Lokal Desa tentang latar belakang, tujuan, kebijakan, prinsip-prinsip, prosedur dan ketentuan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;

[76] Modul pelatihan pratugas Pendamping Lokal Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
[77] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Meningkatkan keterampilan Pendamping Lokal Desa dalam memfasilitasi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian program;
- Meningkatkan keterampilan Pendamping Lokal Desa dalam memahami mekanisme pendampingan;
- Meningkatkan keterampilan dalam membina dan memberi pengarahan kepada Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Menumbuhkan komitmen dan sikap kepedulian Pendamping Lokal Desa terhadap masyarakat perdesaan.

Adapun struktur materi pelatihan, materi pelatihan ini dirumuskan berdasarkan hasil kajian terhadap kompetensi dasar yang harus dimiliki sesuai kerangka acuan kerja yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Selanjutnya hasil analisis terhadap kompetensi PLD disusun berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi (K1) Pengetahuan, (K2) Sikap dan (K3) Keterampilan yang merujuk pada taksonomi Bloom dan Kartwohl (2001) dengan indikator kedalaman materi sebagai berikut:

**Tabel 3. 12 : Ruang Lingkup materi sesuai tingkat kopetensi**

| K1 (Pengetahuan) | K2 (Sikap) | K3 (Keterampilan) |
|---|---|---|
| 1. Mengetahuan<br>2. Mengetahui<br>3. Mengaplikasikan<br>4. Menganalisis<br>5. Mensistesis<br>6. mengevaluasi | 1. Penerimaan<br>2. Menanggapi<br>3. Penilaian<br>4. Mengorganisasikan<br>5. Karakterisasi | 1. Meniru<br>2. Memanipulasi<br>3. Pengalamiahan<br>4. Artikulasi |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara rinci setiap pokok-pokok materi ditetapkan tingkat keluasan dan kedalamnya berupa kisi-kisi materi pelatihan yang akan memandu pelatih dalam proses pembelajarannya. Kisi-kisi materi pelatihan diuraikan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**TABEL 3.13 : MODUL PELATIHAN PRATUGAS PENDAMPING LOKAL DESA**

| NO | Rumpun | Pokok Bahasan | Sub Pokok Bahasan | K1 (p) | K2 (K) | K3 (S) | JP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BIna suasana dan orientasi latihan | Dinamika kelompok dan pengorganisasian peserta | - Perkenalan<br>- Pengungkapan harapan peserta<br>- Tujuan dan proses pelatihan<br>- Tata tertib pelatihan | <br>1<br><br>1<br>3 | | 1<br><br><br><br>2 | 2 |
| 2. | Prespektif dan kebiakan | Desa dan visi Undang-Undang desa | - Kondisi dan dinamika desa<br>- UU Desa sebagai cara pandang dan sarana menuju keberdayaan desa | 2<br>1,2 | | | 3 |
| | | Tata kelola desa | - Kelembagaan dalam tata kelola desa<br>- Musyawarah desa sebagai basis tata kelola dan penggerak demokratisasi desa<br>- Prinsip-prinsip tata kelola desa | 1<br>2<br><br><br>1 | | | 4 |
| 3. | Penyelenggaraan pemerintahan da pembangunan desa | Pembangunan desa | - Sistem pembangunan desa<br>- Perencanaan pembangunan desa<br>- Pengelolaan keuangan desa | 1<br>1,3<br><br>1,2 | | <br>2<br><br>2 | 16 |
| | | Pembangunan ekonomi desa | - Arah dan orientasi pengembangan orientasi desa<br>- BUM Desa sebagai | 1<br><br>1 | | | 2 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | penggerak perekonomian desa | | | | |
| | | Penyusunan peraturan di desa | - Pokok-pokok penyusunan peraturan di desa<br>- Strategi fasilitasi penyusunan peraturan di desa | 1<br>1 | | | 2 |
| | Pemberdayaan | Penguatan keberdayaan masyarakat | - Pemberdayaan masyarakat desa<br>- Strategi penguatan kader pemberdayaan masyarakat desa<br>- Strategi penguatan lembaga kemasyarakatan desa | 2<br>1<br>1 | | | 5 |
| | | Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan | - Konsep pelatihan masyarakat<br>- Ketrampilan dasar melatih | 1 | 2 | | 4 |
| 4. | Pendampingan | Pendampingan | - Konsep dan kebijakan pendampingan<br>- Keterampilan pendamping<br>- kinerja pendamping | 2 | 2 | 2 | 8 |
| | | Membangun tim kerja di desa | - Kerjasama tim di desa<br>- Membangun jejaring | 2<br>2 | | | 2 |
| 5. | Evaluasi dan RKTL | RKTL<br>Post test<br>Evaluasi | - Pokok-pokok RKTL<br>- Menyusun RKTL | 2<br>3 | | | 2 |
| | | Jumlah jam pelajaran | | | | | 50 |

3) Struktur Organisasi Pendamping Desa

**Gambar 3. 14: Susunan Organisasi Pendamping Desa**

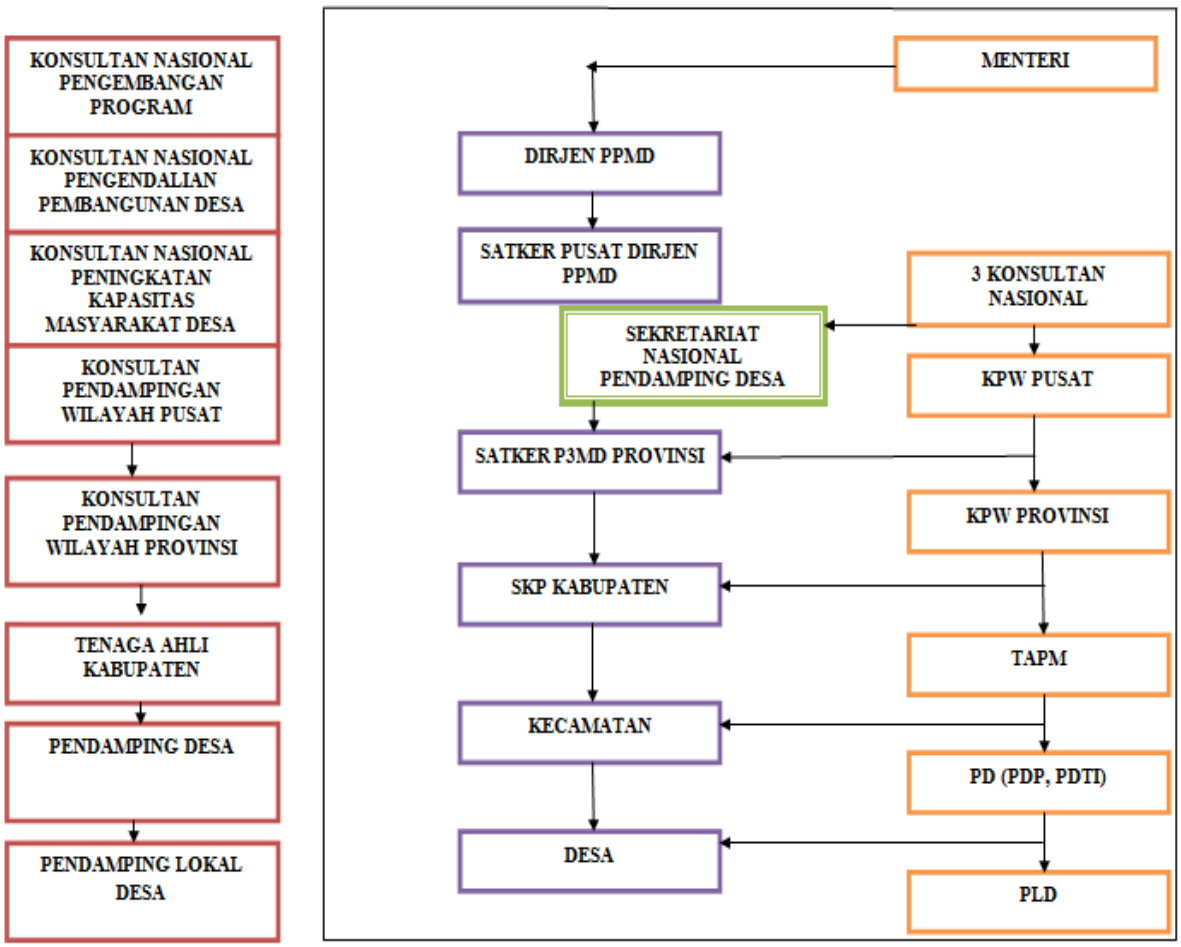


Sumber : SOP Pembinaan dan Pengendalian Pendamping Profesional

Mengingat sasaran dari kebijakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan (PDP, PDTI, PLD) merupakan aktor lini terdepan dalam program pendamping desa. Dalam penelitian ini focus pada Pendamping Lokal Desa yang berkedudukan di Desa. Karena pendamping desa yang berinteraksi secara langsung dan intensif dengan perangkat desa dan masyarakat desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai ujung tombak program, pendamping desa harus mengemban amanat (Dekonsentrasi) dari kementerian Desa PDTT dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban diapresiasikan melalui pelaporan sesuai dengan hirarki atau struktur organisasi pendamping desa. Sehingga menjadikan satuan kerja pendamping desa menjadi pihak yang independen atau eksternal di pemerintahan desa.

**Tabel 3.15 : Komposisi Pendamping Desa di Kecamatan Karangbinangun**

| **Kecamatan Karangbinangun Terdiri dari 12 Desa** | | | |
|---|---|---|---|
| **Kurun Waktu** | **Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP)** | **Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI)** | **Pendamping Lokal Desa** |
| Tahun 2017 | 2 Orang | - | 5 Orang |
| Per Maret 2018 | 3 Orang | 1 Orang | 6 Orang |

Sumber: Hasil wawancara dengan Pendamping Lokal Desa

Berdasarkan dari tabel 3.15, adapun rincian daftar nama berdasarkan komposisi Pendamping Desa Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.16 :Daftar Nama Pendamping Desa Kecamatan Karangbinangun**

| **Tahun** | **Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP)** | **Pendamping Desa Tehnik Infrastruktur (PDTI)** | **Pendamping Lokal Desa (PLD)** |
|---|---|---|---|
| **2017** | Bahrul Ulum | - | Moh Rofiq |
| | Agus Wahyudi | | Ali Musta'in Aziz |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| | | | |
|---|---|---|---|
| . | | | Lailatul Karimah |
| | | | M. Kafidz |
| | | | Tarmuji |
| **2018** | Bahrul Ulum | Abdul Rauf | Moh Rofiq |
| | Tamim Ashar | | Ali Musta'in Aziz |
| | Sumartawi | | Lailatul Karimah |
| | | | M. Kafidz |
| | | | Tarmuji |
| | | | Azwar Hamid |

Sumber: Hasil wawancara dengan Pendamping Lokal Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

## A. Mekanisme kerja pendamping desa

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat brsifat nasional, regional maupun lokal seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah Daerah/Provinsi, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Dan Keputusan Bupati/Walikota.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional. 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.[78]

Jadi kebijakan merupakan suatu hal yang mudah untuk dipahami serta suatu hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan yang ingin di tempuh. dalam hal ini setiap kebijakan yang dikeluarkan atau yang di tetapkan oleh pemerintah pasti memiliki tujuan, dalam tujuannya akan di dasarkan pada masyarakat. Seperti adanya kebijakan tentang pendamping desa yang mana

[78] Hesel Nogi Tangkilisan. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. (Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.2003) halaman 2



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menteri Desa memberikan tenaga pendamping desa guna untuk kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.[79] Menurut Kepala Desa karanganom

> *"Adanya tenaga pendamping desa ini yaa, sejak program dana desa, iyaaa,, pendamping desa ini di atur dalam Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 03 Tahun 2015, pendamping desa ini dilaksanakan agar adanya pemerataan dan percepatan dalam pembangunan yang ada di desa, kami berharap dengan adanya pendamping desa ini dapat membantu masalah-masalah yang ada didesa, khususnya dalam segi pembangunan yang ada di desa ini, karena disini merupakan daerah yang dalam segi pembangun kurang optimal, banyak jalan yang rusak"*[80]

Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan sebuah masalah yang harus dipecahkan oleh pemerintah maupun oleh lembaga yang dekat dengan masyarakat yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. kebijakan lahir karena ada suatu masalah yang hendak dipecahkan. Oleh karena itu, kebijakan merupakan alat atau cara untuk memecahkan masalah yang sudah ada sehingga dalam hal ini yang menjadi dasar pembuatan kebijakan adalah masalah. Jika tidak ada masalah tidak perlu ada suatu kebijakan baru.

Proses kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak baik mereka yang terlibat langsung maupun tidak. Ketika

[79] Ibid,.
[80] Wawancara, Ainur Rofiq, 14 mei 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya yang tersedia menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya suatu kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana suatu kebijakan harus mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik, struktur organisasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting pada proses implementasi kebijakan.

Dalam pemerintahan yang baik hubungan yang sinergis dan kontruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat. Pendapat ini menyatakan bahwa adanya hubungan yang kompleks antara tiga elemen tersebut.[81] Sama halnya dengan kebijakan adanya program pendamping desa, jadi antara pemerintah desa, pendamping lokal desa, serta masyarakat membutukan kerjasama yang baik. Oleh sebab itu keduanya harus berjalan secara sinergis dalam mewujudkan tujuan pemerintah untuk mensejahterakan mesyarakat dengan mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menginginkan peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa Sukorejo memaparkan :

> *"Ya kalau kita membutukan pendamping lokal desa kami melakukan komunikasi, sekarang kan zamannya sudah beda mbak, pakai hp kalau ada yang ingin disampaikan, soalnya pendamping desa mendampingi 4 atau 5 desa, jadi tidak setiap hari pendamping itu ada di kantor desa. menjadikan banyak tugas yang di emban dari pendamping desa tersebut"*

Dalam pelaksanaan birokrasi yang di lakukan yang ada di desa belum sepenuhnya maksimal dikarenakan hubungan antara pendamping desa dan

[81] Sedamayanti, *Good Govermance: Kepemrintahan yang baik dalam rangka otonomi daerah upaya membangun organisasi efektif dan efisien melalui restrukturisasi dan pemberdayaan*, (Bandung: Mandarmaju, 2003 ) Hal 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepala desa tidak begitu akrab dikarenakan pekerjaan yang di lakukan oleh pendamping desa dalam proses pendampingan tidak hanya fokus pada satu desa saja, melainkan banyak desa yang harus didampingi.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa memberikan harapan baru sekaligus tantangan baru bagi desa, dalam Undang-Undang tersebut pemberdayaan dan pembangunan menjadi sebuah misi, tujuan, asas dan agenda kebijakan yang secara prinsip diwujudkan dengan mengakui dan menetapkan kewenangan desa, sementara pemerintah berkewajiban menjamin agar desa mampu melaksanakan upaya pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan.

Seperti yang tertuang dalam pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Pemerintah, Pemerintah desa Propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten, atau kota bertugas untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa. Yang artinya desa haruslah mendapatkan bimbingan, pembinaan, serta pengawasan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembagunan dan pelayanannya terhadap masyarakat sekaligus memberdayakan masyarakat itu sendiri. Menurut Pendamping Lokal Desa, Moh Rofiq ;

> *"Dalam Pembangunan, desa merupakan Aset yang penting karena apa, karena desa dapat menjadi penggerak kemajuan masyarakat Indonesia. sesuai dengan Nawacita bapak Presiden yang menyatakan bahwa akan membangun Indonesia dari pinggiran yang slama ini tertinggal dengan memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam kerangka negara kesatuan.*[82]

[82] Moh Rofiq , *Wawancara*, 31 mei 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut data yang ada yang ada di Kementerian Dalam Negeri Indonesia memiliki jumlah desa hingga tahun 2015 mencapai 74.093 desa.[83] Ini artinya bahwa Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia begitu banyak memiliki pemerintahan desa. Berdasarkan data tersebut maka kedudukan desa sangat penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembagunan nasional atau sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintah negara indonesia.[84]

UU Desa ini di yakini sebagai gerbang harapan menuju kehidupan berdesa yang lebih maju.[85] Sebagai dasar hukum bagi keberadaan desa, UU Desa mengkontruksi cara pandang baru praksis berdesa (pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa). Desa di kukuhkan sebagai subjek yang mengatur dan mengurus dirinya sendiri dalam arti lainnya dapat dikatakan bahwa saat ini desa membangun yang artinya desa diharapkan mampu megatur dirinya sendiri.

Pembangunan desa sebagai sistem yang di kontruksikan UU Desa, menempatkan masyarakat pada posisi strategis yaitu sebagai subjek pembagunan. Dengan demikian, masyarakat memiliki peran strategis dalam tata kelola desa termasuk di dalamnya penyelenggaran pembagunan desa.

Pemerintah menetapkan kebijakan pendampingan sebagai yang tercantum pada pasal 2 peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2015, yang bertujuan.

---

[83] Jumlah desa mangacu pada PEMEDAGRI No 39 Tahun 2015 Tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintah

[84] Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara (perdebatan dan Gagasan penyempurnaan),* Yogyakarta:FFH UI Press,2004 Hal 361

[85] *Ibid*.., hal 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Meningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintah desa dan pembagunan desa
- Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembagunan desa yang partisipatif
- Meningkatkan sinergi program pembagunan desa antar sektor
- Meningkatkan aset lokal desa

Dengan hadirnya kebijakan penempatan pendamping desa sebagai amanat Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa maka hadirlah peraturan menteri desa, pembagunan daerah tertinggal dan transmigrasi No 3 tahun 2015 tentang pendamping desa yang membahas mengenai pendamping desa termasuk didalamnya mengenai pembagunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi fokus pendamping desa.[86]

Pendamping Desa memiliki kedudukan dalam pemerintahan desa dan mempunyai kewenangan dari kementrian. Sehingga mengharuskan seorang pendamping desa untuk menjalankan peran sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa Pasal 12 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa tugas pendamping desa adalah mendampingi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan.

Sama halnya dengan pembangunan desa yang harus melalui beberapa serangkaian proses pengelolaan yang diantaranya perencanaan, pelaksanaan,

[86] Peraturan Menteri Desa, Pembagunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik indonesia nomor 3 tahun 2015 tentag pendamping desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pemantauan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya pada pemerintahan desa. Untuk lebih detailnya tentang proses pengelolaan pembangunan desa dijelaskan sebagai berikut :

**1. Tahap Perencanaan**

Perencanaan merupakan sebuah proyeksi terhadap kegiatan apa saja yang akan dilakukan kedepannya. Proyeksi yang dibuat harus melalui pertimbangan yang matang berdasarkan kebutuhan yang ada. Oleh sebab itu pembangunan desa harus melalui tahap perencanaan terlebih dahulu agar berjalan dengan baik dan sejalan dengan yang dijelaskan dalam undang-undang pasal 79 UU desa tentang perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada rencana pembangunan kabupaten/kota.[87] Perencanaan desa dilaksanakan dengan menyusun dokumen :

c) Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 tahun

d) Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 tahun

Kedua dokumen perencanaan ini ditetapkan dengan peraturan desa. Pasal 79 ayat 4 dan 5 menyatakan bahwa peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

[87] Undang-Undang Tentang Desa pasal 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang mengacu pada RKPDes kemudian di tetapkan dalam bentuk peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PerDes APBDes) yang di dalamnya terdapat besaran anggaran desa yang bersumber dari Dana Desa.

Menurut Moh Rofiq selaku Pendamping Lokal Desa:

> *"Perencanaan yang dilakukan dalam pembangunan meliputi seperti, di adakannya Musrenbangdes, selanjutnya survey lokasi dan penyiapan bahan-bahan yang akan digunakan dalam pembangunan"*[88]

Dan dalam setiap proses pembangunan desa, warga masyarakat diharuskan ikut dalam partisipasi pembangunan. Seperti yang di paparkan oleh Kepala desa Karanganom bapak Ainur Rofiq, beliau menjelaskan:

> *''Dalam pembangunan yang ada di desa kami sebagai perangkat desa sangat mengutamakan masyarakat desa sediri terutama yang ikut andil dalam pembangunan"*[89]

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perencanaan pembangunan pedesaan harus melibatkan partisipasi masyarakat yang diawali dari kegiatan- kegiatan yang disebut sebagai "rembug desa". Kegiatan ini dilaksanakan pada lingkup Rukun Warga (RW) sebagai forum untuk menyerap aspirasi warga mengenai masalah-masalah yang dirasakan dan kebutuhan program atau kegiatan pembangunan. Aspirasi mana selanjutnya dibawa ke forum yang lebih tinggi yakni desa atau kelurahan melalui kegiatan yang disebut Musrenbangdes (Musyawarah Rencana

[88] Moh Rofiq, *Wawancara*, 31 Mei 2018
[89] Moh Rofiq, *Wawancara*, 14 Mei 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembangunan Desa). Dari hasil Musrenbang tersebut dapat dipilih apa usul masyarakat yang menjadi prioritas di desa tersebut atas persetujuan masyarakat desa dan pemerintah desa. Setelah hal tersebut disetujui pembangunan akan dilakukan dengan arahan pendamping desa yang bertujuan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat desa dan pemerintah desa mengenai pembangunan yang ingin dibangun didesa tersebut, Pendamping desa membuat konsep perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga proses penyelesaian yang bersifat akuntabel.

Bertitik tolak dari ketentuan tersebut dan mengamati bagaimana pelaksanaan Musrenbangdes di beberapa dusun di desa Sukorejo tampak belum semua Rukun Warga (RW) menyelenggarakan kegiatan "rembug desa". Apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sangat mungkin aspirasi warga tidak dapat ditampung. Kehadiran ketua atau pengurus RW belum tentu sungguh merepresentasikan masalah dan kebutuhan masyarakat di lingkup Rukun Warga (RW) nya. Situasi ini dapat berdampak tidak terakomodasikannya kepentingan atau kebutuhan masyarakat dalam mana kegiatan rembug warga tidak diselenggarakan. Indikasinya ialah bahwa usulan prioritas pembangunan yang dihasilkan pada kegiatan Musrenbangdes ternyata tidak merata di semua wilayah dusun yang bersangkutan.

Beda halnya dengan desa Karanganom, terjalin kerukunan diantara RT, RW dan pemerintah desa sehingga aspirasi warga dapat tertampung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan diselesaikan dengan musyawarah. Hal ini juga disampaikan pendamping desa, Moh. Rofiq ;

> *"Desa Sukorejo kurang maksimal, baik kehadiran juga penyampaian aspirasi, sedangkan di desa Karanganom masyarakat lebih antusias, sehingga tingkat kehadiran juga banyak dan masyarakat proaktif menyampaikan aspirasi. Kepala desa memberi umpan balik kepada masyarakat, dengan bertanya kepada ketua RT, RW, dan Kepala Dusun apa yang diusullkan di wilayahnya".*

Dari pendapat yang disampaikan diatas dapat disimpulkan bahwa kurang aktifnya peran Masyarakat desa Sukorejo dalam menyampaikan aspirasinya dalam perencanaan pembangunan. Jadi perlu adanya peran perangkat desa untuk mendorong dan memonitor kegiatan tersebut di lingkungan RW di wilayah dusun-dusun Sukorejo sehingga semua masalah, kepentingan, dan kebutuhan warga dapat terpetakan.

Hasil dari Musrenbangdes desa diperlukan agar pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan masyarakat desa. Sebelum melakukan pelaksanaan pembangunan, Pendamping lokal desa bersama Tim pengendali tingkat kecamatan akan melakukan survey ke lokasi yang akan dibangun. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi dan gambaran umum mengenai lokasi yang menjadi target pembangunan. Dari hasil survey, Pendamping lokal desa juga dapat memperkirakan kuantitas dan kualitas bahan yang akan digunakan dalam proses pembangunan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**2. Tahap Pelaksanaan**

Hal yang dilakukan pendamping lokal desa dalam proses pelaksanaan yaitu membantu pembuatan RAB, dari hasil survey yang dilakukan akan mengasilkan penafsiran/ perkiraan mengenai jumlah berapa besar rencana biaya, jumlah kebutuhan tenaga kerja, bahan, dan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan pembangunan sehingga memudahkan dalam pembuatan RAB (Rencana Anggaran Biaya). Menurut Moh. Rofiq selaku Pendamping Desa menjelaskan

> *" jika dana desa itu turun, kita sebagai Pendamping desa yang akan melakukan dan memastikan semua dokumen persyaratan dana desa yang sudah lengkap. Syarat pencairan dana desa dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) ke RKD (Rekening Kas Desa) itu isinya ada 4 macam yaitu 1. Peraturan tentang RKPDesa (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) , 2. Peraturan desa tentang APBDesa, 3. RAB (Rencana Anggaran Biaya), dan yang terakhir itu tentang Surat Permintaan Pembayaran oleh Timlak ke Kepala Desa. Lah .. Surat pembayaran oleh Timlak ke Kepala Desa ini bisa dicairkan apabila sudah ada barang atau jasa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Timlak.*[90]

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan pendamping desa yaitu melakukan fasilitasi ke Tim Pelaksana (Timlak) dengan menyiapkan berkas sebagai syarat pencairan dana (Surat Permintaan Pembayaran ) ke Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan RAB yang diajukan Timlak akan dilakukan verifikasi dahulu oleh sekretaris desa sebelum disetujui terlebih dahulu oleh Kepala Desa. Jika berkas tersebut disetujui atau disahkan oleh Kepala Desa, maka pihak Bendahara melakukan pembayaran/ pengeluaran uang dari kas desa

[90] Moh. Rofiq, *wawancara* 7 Juni 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam proses pelaksanaan pembangunan, Pendamping Lokal Desa memastikan material yang digunakan sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) atau tidak. Material yang diperlukan misalnya semen, pasir, atau bahan campuran material lain yang dibutuhan dan sesuai dengan RAB yang telah dibuat. Hal berikutnya yang perlu diperhatikan ialah proses pembangunan yang akan dibangun oleh tenaga ahli dari masyarakat desa setempat. Pendamping desa berperan dengan memilih tukang yang bekerja dalam pembangunan yaitu masyarakat desa itu sendiri, dengan tujuan agar hasil bangunan tersebut dapat berjalan maksimal. Pendamping desa, Moh. Rofiq mengatakan:

> *"Kalau proses pembangunan kita menggunakan tenaga masyarakat desa yaitu para pemuda desa. Kita jarang menggunakan tenaga dari luar soalnya pembangunan nantinya tidak berjalan maksimal, tapi kalau di desa tersebut tidak ada tenaga ahli maksudnya orang yang mampu mengkonsep pembangunan tersebut, kita menyewa dari luar tapi hanya tenaga ahlinya saja bukan pekerjanya.*

Dari penjelasan diatas, diperkuat dengan adanya RAB yang menyebutkan tentang tenaga kerja yang menjelaskan bahwa tenaga kerja yang terlibat dalam proses pelaksanaan pembangunan, perkerja yang diprioritaskan dan diharapkan sebanyak mungkin dari masyarakat desa itu sendiri

Akan tetapi hasil yang ada di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang ada di desa Sukorejo kurang aktif dalam pelaksanaan program pembangunan desa yang di laksanakan pendamping desa. Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di desa karena masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya serta proyek-proyek akan gagal. Selanjutnya bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses perencanaannya karena mereka akan lebih mengetahui seluk- beluk terhadap proyek tersebut. Partisipasi merupakan hak demokrasi bila masyarakat dilibat dalam pembangunan.

Bapak Bisri sebagai Masyarakat desa Sukorejo (Dusun Mengai) menjelaskan:

> *"gak pernah ada undangan atau pengumuman bantu pembangunan mbak, di atasi dewe sama kepala desa e"*[91]

Hal senada pula dipaparkan oleh Bapak Nurhadi masyarakat desa Sukorejo :

> *"Ya kami sebagai masyarakat yang ada di desa Sukorejo ini, saya pribadi tidak mengetahui mbak pembangunan yang dilakukan itu program pemerintah, apa tadi pendampingan desa ya? tapi tidak tau masyarakat yang lain mengetahui apa tidak. dan saya menjalani aktifitas koyok biasane. Pergi ke sawah"*[92]

Lain halnya pendapat dari bapak Surasin selaku warga desa Karanganom, Beliau memaparkan [93]

[91] Bisri, *Wawancara*, 1 juli 2018
[92] Nurhadi, *Wawancara*, 1 juli 2018
[93] Surasin, *Wawancara*, 31, mei 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *"yo akeh perubahan mbak, wes suwih nang deso iki ora ono pembangunan blas.. kawit ono pendamping deso, mulai akeh pembangunan. Koyok dalan sing nang ngarep omahku iki wes lumayan enak ketimbang wingi sak durunge dibangun. Terus jalan ape nang kuburan iku yo didandani. Dan ogak kebanjiran maneh.*
>
> *Nggeh ono mbak sing gelem ngewangi tapi wes ono pekerjae dewe kok, wong-wong yo mok kadang takon-takon, ndelok-ndelok pembangunane soale yo wes ono pekerjae dewe. Tapi seumpama butuh opo-opo warga yo podo nyediani mbak. Koyok wingi pas mbangun onok sing butuh sekrop utowo opo ngunu warga gelem bantu karo ewang-ewang.*

Dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan suatu yang penting dalam pembangunan, akan tetapi kesadaran masyarakat dalam pembangunan dirasa kurang karena masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan keikutsertaan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

Dalam lingkup desa Karanganom, partisipasi masyarakat sangat berperan dalam pembangunan desanya. Pendamping Lokal, Desa Moh Rofiq memaparkan

> *"Masyarakat desa Karanganom ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan, masyarakat desa lebih ngerti adanya pendampingan. Jadi lebih aktif ikut berpartisipasi di desa dibandingkan masyarakat desa yang lain"* [94]

Hal senada pula disampaikan Kepala Desa Karanganom :

> *" kami Pemerintah Desa lebih mengutamakan masyarakat dalam segi apapun program yang berhubungan dengan desa seperti program pendamping desa, yang melaksanakan pembangunan di desa ini masyarakat ikut*

[94] Moh Rofiq, *Wawancara*, 14 Mei 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *dalam pelaksanaan, seperti gotong royong, membantu menyediakan peralatan pembangunan, seperti itu"*[95]

Dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan masyarakat desa Karanganom dalam pelaksanakan pembangunan menjadikan program yang didampingi pendamping desa berjalan dengan baik dan maksimal, karena dalam pelaksanaan program pembangunan tanpa partisipasi dari masyarakat menjadikan program tidak berjalan baik, karena dalam program yang di dikeluarkan pemerintah dibuat untuk masyarakat, agar dapat ikut serta dalam pelaksanaan program apapun.

**3. Tahap Pemantauan (Monitoring)**

Dalam tahap ini pendamping desa mengawasi dan mencermati segala kemungkinan angaran pembangunan yang ada di desa berjalan dengan lancar sesuai yang telah ditetapkan. Dari setiap daerah yang akan dibangun memiliki anggaran sesuai yang dibutuhkan desa dalam RAB (Rancangan Anggaran Biaya) dan terdapat proses pencairan dalam tahap proses pembangunannya. Seperti yang dikemukakan Moh. Rofiq selaku pendamping desa Karanganom dan Sukorejo :

> *"Dari RAB Proses Pencairannya ada dua kali. Tahap pertama 60% dari RAB, kemudian tahap kedua 40% dari RAB, dan masing-masing harus sudah disertai LPJ. Kita melakukan monitoring sampai pengerjaan fisik selesai 100% .*

Dengan demikian peran dari pendamping desa sangat dibutuhkan terutama dalam hal anggaran dana desa dalam bentuk pembangunan sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) desa. Pengawasan dilakukan

[95] Ainur Rofiq, *Wawancara*, 14, mei 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar tidak ada kesalahpahaman antara pemerintah desa dan masyarakat sehingga pembangunan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan fungsinya.

Dalam setiap proses pencairan dana harus disertakan Laporan Pertanggung jawaban (LPJ). Laporan ini berisikan pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan dalam proses pembangunan dengan terperinci termasuk pembelanjaan yang dilakukan selama proses pembangunan berlangsung. Hal ini menunjukkan ketransparanan terhadap masyarakat desa dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat desa bahwa dalam setiap kegiatan harus adanya laporan pertanggung jawaban untuk menghindari korupsi. Dalam memonitoring pembangunan akan dilakukan oleh tim pengendali dari kecamatan dan pendamping desa. Proses monitoring dapat dilakukan dengan melihat hasil di lapangan dalam pembangunan dengan pengecekan kesesuaian RAB dan LPJ yang sudah di buat oleh pemerintah desa dan pendamping desa. Seperti yang dikemukakan Kepala Desa Karanganom :

> *"Adanya monitoring dari tim pengendali kecamatan dalam penyelesaian pembangunan mengenai papan informasi tentang anggaran pembangunan dari pihak kami belum melakukan pemasangan papan informasi tersebut sehingga ada teguran dari pihak kecamatan"*

Anggaran dana desa sangat rawan terjadi kecurangan sehingga transparansasi pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan pembangunan. Seperti masalah yang ada di desa Sukorejo mengenai anggaran dana desa, pendamping desa Moh. Rofiq mengutarakan :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *"Pemerintah desa kurang transparan dalam penggunaan anggaran. Kami sebagai pendamping sudah mengingatkan, mengarahkan, memotivasi tapi kita sudah melaporkan kegiatan yang ada dilapangan ke atasan atau ke kecamatan karena atasan yang lebih berwenang. Semoga tahun depan mulai membaik kerja samanya antara pendamping dan pemerintah desa.*

Dari pemaparan yang sudah disampaikan diatas, dalam transparansi harusnya diketahui oleh banyak pihak seperti pihak pemerintah, masyarakat dan pihak yang terkait didalamnya. Untuk itu perlu adanya keterbukaan dalam setiap kegiatan tata kelola pemerintahan khususnya pada pengelolaan anggaran dana desa. Selain daripada itu dengan adanya transparansi sedikit banyak akan mengurangi anggapan atau kecurigaan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam sebuah birokrasi.

**B. Tantangan pendamping desa dalam optimalisasi pembangunan**

Peran pendamping desa akan mempermudah pekerjaan kabupaten untuk mewujudkan kemajuan desa. Selain itu, kegiatan juga lebih terkoordinir dengan baik dan sistematis. Namun dengan tercapainya misi yang dilakukan, tidak luput dengan tantangan atau hambatan yang dilalui oleh pendamping desa. Seperti yang dikemukakan oleh pendamping desa secara umum seperti :

1. *Tidak semua aparat pemerintah desa serta merta welcome dengan keberadaan Pendamping Desa*

Dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di desa Sukorejo dan desa Karanganom, ada sebagian pihak perangkat desa yang tidak menerima dengan adanya pendamping desa. Seperti halnya di desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sukorejo, dengan hadirnya pendamping desa menjadikan pemerintah desa merasa di awasi.

Dengan melihat perbandingan di desa Karanganom, Pemerintahan desa Karanganom serta perangkat desa yang telah pendamping desa temui tidak menemukan adanya masalah. Semua perangkat desa senang dengan adanya pendamping desa karena mereka merasa terbantu dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang di desanya. Pendamping desa menilai bahwa pemerintahan yang ada di Karanganom benar-benar melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

2. *Adanya ketakutan dari pemerintah desa, karena awalnya mereka mempunyai asumsi jika kinerja pendamping di kira LSM.*

Pemerintah desa berasumsi bahwa munculnya pendamping desa sama seperti kegiatan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terkesan rusuh dengan melakukan introgasi ke lingkungan desa kemudian memberikan kegiatan/ program- program desa, namun dari program yang dilakukan membutuhkan dana yang diambil dari pemerintah desa bukan dari pemerintah pusat.. dengan demikian, LSM dinilai tidak mendidik dan tidak mengarah pada pembangunan desa.

3. *Jadwal pelaksanaan pembinaan tidak semuanya berjalan tersistematis karena rata-rata SDM perangkat desa masih lemah*

Pelaksanaan yang di lakukan tidak berjalan sistematis karena dari SDM Perangkat desa yang masih lemah. Hal ini perlu adanya kaderisasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan yang lebih baik. Dari hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wawancara dan kunjungan yang dilakukan Peneliti di dua desa, yaitu desa Sukorejo dan Karanganom dapat diketahui bahwa ada beberapa perangkat desa yang menjabat di desa tersebut tergolong orang lama yang masih menjabat dari tahun ke tahun tanpa ada pergantian jabatan. Kinerja perangkat desa dinilai kurang baik dengan melihat program kegiatan pembinaan yang tidak semua berjalan sistematis. Dengan demikian perlu adanya evaluasi dalam peningkatan SDM untuk melakukan pergantian staf atau kader perangkat desa yang lebih kompeten sehingga pelaksanaan program pembinaan dapat berjalan dengan baik.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pendamping lokal desa, tantangan dapat dirangkum dari 3 hal, yaitu komunikasi, Birokrasi, dan Sumber Daya Manusia (SDM) ;

*a) Komunikasi*

Komunikasi yang terjalin dalam pelaksanaan program pendampingan desa salah satunya adalah pada saat proses sosialisasi program, dilaksanakan dengan sistem koordinasi mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan sampai pada masyarakat desa melalui peran dari para pelaku kebijakan di tingkat desa seperti kepala desa, perangkat desa dan tentu saja Pendamping Desa. Keberhasilan pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan pendamping lokal desa bergantung pada sukses atau tidaknya proses sosialisasi pada masyarakat. Hal ini merupakan tantangan bagi Pendamping lokal desa, seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa sebagian desa (desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sukorejo) dalam tingkat partisipasi dinilai masih rendah. Bentuk partisipasi masih dalam bentuk memberikan tenaga, gotong-royong, penyampaian ide atau gagasan dalam pelaksanaan program masih sangat terbatas. padahal partisipasi dari masyarakat sangat berguna sebagai komunikasi dua arah dan membuka kesempatan untuk bernegosiasi dan memberikan masukan atau pendapat agar program kedepan berjalan semakin baik. Secara umum hambatan yang ditemui pada partisipasi masyarakat di pedesaan antara lain masih terbatasnya kualitas sumberdaya manusia dan pengetahuan, tingkat perekonomian masyarakat masih rendah dan kebiasaan masyarakat yang lebih mengutamakan mencari nafkah daripada memikirkan masalah pembangunan.

*b)* Birokrasi

Birokrasi yang berkaitan dengan pemerintahan yang baik dapat dilihat dari sejauh mana hubungan antara pemerintah desa, pendamping lokal desa serta masyarakat yang saling bersinergi dalam melaksanakan program atau memberi pelayanan kepada masyarakat. Seperti halnya pemerintahan yang ada di desa Karanganom, Moh Rofiq selaku Pendamping Lokal Desa menjelaskan :

> *" Birokrasi yang ada di desa Karanganom ini menurut saya cukup baik di banding desa lain yang saya dampingi, meski dari tatanan struktur organisasi di desa ini belum semua terisi, namun mereka mampu menjalankan program yang diberikan pemerintah. Tapi rencana tahun depan ada perekrutmen. desa, Yang saya lihat, kepala desa Karanganom ini sangat supel dengan masyarakat, dan mau berbaur dengan masyarakatnya, sehingga masyarakat tidak terlihat ada*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *batasan, jadi jika ada keluhan masyarakat datang ke kepala desa untuk menyampaikan keluhan atau masalah yang ada di desa.*[96]

Hal senada pula di paparkan oleh Kepala Desa Karanganom

> *" yang menjadikan kebijakan itu berjalan dengan baik, dibutuhkan kerjasama yang baik pula dari kami, pendamping desa, serta masyarakat. Harus bersinergi dalam melaksanakan program yang ada. Dalam proses pelaksanaan pembangunan ini tidak bisa berdiri sendiri, adanya pendamping desa serta masyarakat yang ikut dalam pelaksanaan ya sangat membantu dan berdambak positif bagi desa.*

Dapat dijelaskan bahwa dalam membangunan desa perlu adanya kerjasama yang terjalin antara pemerintah desa, pendamping desa, dan masyarakat agar dapat berjalan efektif dan efisien dalam mempercepat program pembangunan desa. Dari temuan dilapangan, desa Karanganom belum sepenuhnya menjalankan program secara efektif karena memiliki tatanan organisasi yang belum lengkap. Struktur organisasi hanya diisi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kasi Pelayanan. Kurangnya anggota dalam sistem organisasi desa menjadikan tugas pemerintahan terbagi, tidak dapat fokus dan banyak yang merangkap tugas adminisrasi desa. dengan demikian perencanaan perekrutan anggota perangkat desa akan dilakukan tahun depan untuk mengisi kekosongan dalam sistem organisasi desa. dalam pelaksanaan pembangunan, Birokrasi yang ada di desa ini tetap berjalan dengan baik antara pemerintah desa dan pendamping desa selaku pelaksana kebijakan. Namun jika tatanan

[96] Moh Rofiq, *Wawancara*, 14 mei 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

organisasi tidak segera diisi, maka seterusnya akan menjadikan hambatan pendamping lokal desa dalam menjalankan programnya.

Dalam pelaksanaan birokrasi di desa lain, desa Sukorejo menunjukkan birokrasi yang belum maksimal, hal ini disebabkan karenakan hubungan antara pendamping desa dan kepala desa tidak begitu akrab selain itu pekerjaan yang di lakukan oleh pendamping desa dalam proses pendampingan tidak hanya fokus pada satu desa, melainkan banyak desa yang harus didampingi.

*c)* Sumber Daya Manusia (SDM)

Dilihat dari SDM (Sumber Daya Manusia) dua desa yang diteliti, salah satu desa yaitu desa Sukorejo menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang ada di desa ini kurang aktif dalam pelaksanaan program pembangunan desa yang di laksanakan pendamping desa. Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di desa karena masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya serta proyek-proyek akan gagal. Selanjutnya bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses perencanaannya karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk terhadap proyek tersebut. Partisipasi merupakan hak demokrasi bila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat dilibat dalam pembangunan. Dapat disimpulkan bahwa jika tidak ada peran masyarakat dalam program pembangunan maka pembangunan tidak dapat terwujud, hal ini sekaligus menajdi hambatan bagi pendamping desa dalam memajukan pembangunan desa.

Berkaitan dengan Efektifitas, pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, selain itu pembangunan juga merupakan usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan potensi dan kemampuan desa. Dalam hal ini dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan[97]

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa menerangkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa.[98] Menurut Ginanjar Kartasasmita pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, pandangan ini menunjukkan asas demokrasi dalam konsep pembangunan nasional[99], masyarakat perlu dilibatkan secara langsung bukan karena mobilisasi tapi melainkan sebagai bentuk partisipasi yang dilandasi oleh kesadaran. Pelaku utama dalam pembangunan adalah masyarakat itu sendiri sehingga pemerintah

[97] Rahardjo Adisasmita, *Membangun Desa Partisipatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) hal. 3
[98] Undang-Undang No 6 Tahun 2014
[99] Ginandjar Kartasasmita , *Pembangunan untuk rakyak : memadukan pertumbuhan dan pemerataan*, ( CIDES, 1996) hal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya berperan sebagai fasilitator sama halnya dengan tenaga pendamping desa, yang melaksanakan program pembangunan di desa Sukorejo dan desa Karanganom untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Adapun tujuan dari pendamping desa yaitu meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif, sedangkan yang menjadi tugas dari pendamping desa sesuai Permendes PDTT No 3 tahun 2015 yaitu mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. dalam perencanaan pembangunan dibutuhkan partisipasi dari masyarakat karena masyarakat merupakan aspek penting dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, keberhasilan dalam pencapaian sasaran pelaksanaan pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah tetapi upaya untuk mewujudkan kemampuan dan masyarakat untuk berpatisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi masyarakat sangatlah erat kaitannya dengan kekuatan atau hak masyarakat, terutama dalam pengambilan keputusan dalam tahap identifikasi masalah, mencari pemecahan masalah sampai dengan pelaksanaan berbagai kegiatan.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan merupakan salah satu wujud kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat juga merupakan salah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu faktor yang berpengaruh terhadap berhasil tidaknya program pembangunan dalam suatu wilayah. Pertisipasi dari masyarakat ini diperlukan karena program yang dibuat pemerintah tidak lain adalah untuk masyarakat.

Dapat diketahui dalam penelitian ini meneliti dua desa yaitu desa Sukorejo dan Karanganom, dan dari hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa program pembangunan infrastruktur di dua desa tersebut berjalan maksimal namun dari proses pelaksanaan program pembangunan di salah satu desa tersebut kurang berjalan maksimal. Seperti halnya desa Sukorejo yang dalam kegiatan perencanaan pembangunan tampak belum semua Rukun Warga (RW) menyelenggarakan kegiatan "rembug desa". Jika kegiatan tersebut tidak diselenggarakan dapat diperkirakan bahwa usulan prioritas pembangunan yang dihasilkan pada kegiatan Musrenbangdes tidak merata di semua wilayah dusun yang bersangkutan.

Hal ini berlawanan dari tujuan dari pendamping desa yaitu pendampingan dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif. Pernyataan ini juga diperkuat dengan adanya undang-undang tentang tujuan pembangunan desa pasal 78 ayat 3 yang dalam pelaksanaannya, pembangunan desa penting untuk mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Partisipasi masyarakat sangatlah penting karena tanpa adanya partisipasi dari masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadikan program tidak berjalan baik. Program yang dikeluarkan pemerintah dibuat untuk masyarakat agar ikut serta dalam pelaksanaan program apapun.

Pendampingan yang dilakukan pendamping desa dalam peningkatan partisipasi masyarakat terkendala karena SDM yang kurang peduli akan pentingnya pembangunan. Kesadaran masyarakat dalam pembangunan dirasa kurang karena masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan keikutsertaan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

Dengan membandingkan desa Karanganom, keikutsertaan masyarakat terjalin dengan baik. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses penyelesaian pembangunan. keikut sertaan masyarakat di desa tersebut berdasarkan atas rasa solidaritas yang tinggi sesama warga masyarakat dan kesadaran akan pentingnya pembangunan.

Keberhasilan tugas dan peran yang dilaksanakan oleh pendamping desa, dapat dilihat dari efektivitasnya dalam proses pelaksanaan tugas atau peran pendamping desa dalam memajukan desa tersebut. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam kegiatan maupun program. Untuk mengukur efektivitas bukanlah hal yang mudah. Hal ini disebabkan efektivitas dapat dilihat dari banyak sudut pandang. Jika dilihat dari segi produktivitas, maka efektivitas adalah kualitas dan kuantitas (output). Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesungguhnya dicapai. Menurut Gedeian, mendefinisikan efektivitas adalah *That is, the greater the extent it which an organization`s goals are met or surpassed, the greater its effectiveness* ( Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas).[100]

Selanjutnya mengenai efisiensi, Prajudi Admosudiharjo menyatakan sebagai berikut "kita berbicara tentang efisiensi bila mana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga tujuan akan tercapai[101].

Dari hasil yang sudah dipaparkan diatas dapat dijelaskan bahwa peran pendamping desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa Sukorejo dan Karanganom belum sepenuhnya berjalan optimal, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

a) Desa Sukorejo dalam segi pembangunan berjalan efektif karena ada bentuk nyata dalam bentuk pembangunan infrastruktur, akan tetapi belum dikatakan efisien karena sumber daya tidak diberdayakan secara optimum seperti peran atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa tersebut.

[100] http://www.psychologymania.com/2012/12/definisi-efektivitas.html, diakses pada Jum'at, 29 juni 2018 pukul 08.54 WIB.
[101] Prajudi Admosudiharjo, *Managemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Galia Indonesia, 1987 )hal 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Sedangkan di desa karanganom, pembangunan berjalan efektif serta efisien karena sumber daya diberdayakan secara optimal dan tepat sasaran.

## C. Manfaat Pendamping Lokal Desa dalam optimalisasi pembangunan desa

Pengertian manfaat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah guna atau faedah, laba atau untung. Maka dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa manfaat-manfaat yang diperoleh itu tentunya akan menyebabkan perubahan terhadap suatu yang berdampak positif seperti di desa Karanganom dengan adanya pendamping lokal desa pemerintahan desa sangat terbantu dalam segi pembagunan atau dalam segi administrasi desa.

Menurut Syamsi Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri pembagunan adalah proses perubahan sistem yang di rencanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernis pembagunan dan kemajuan sosial ekonomis.[102] Jadi pemerintah pusat memberikan adanya kebijakan program pendamping desa di daerah tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pendamping desa ini di tuntut untuk membantu pemerintahan desa dalam segi pembagunan dan segi pemberdayaan masyarakat desa yang mana merupakan tugas dari pendamping desa yaitu bisa membantu pemerintah desa

[102] Syamsi Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, *Keuangan Negaradan Analisis Kebijakan Utang Luar Negri*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006) Hal 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hasil wawancara dengan kepala desa Karanganom, peranan pendamping desa sangat bermanfaat dalam pemerintahan desa. Beliau menjelaskan

> *"oo dengan adanya pendamping desa ini jauh, dengan adanya pelaksanaan ini ya, jadi sebelum adanya pendampingan desa itu mungkin desa itu dalam hal administrasi saja korat karet istilahnya, dan adanya pendamping desa ini tertata dengan baik masalah administrasi, intinya kita sangat terbantulah mbak dengan adanya pendamping desa ini".*[103]

Dalam hal ini pemerintah desa karanganom sangat terbantu dengan adanya pendamping desa yang ada di desa, sebelumnya pemerintah desa dalam hal administrasi merasa kurang maksimal dalam mengerjakannya, dan pendamping desa membantu masalah yang ada di desa karanganom ini.

Sesuai dalam pasal 11 permen Desa No.3 Tahun 2015 tentang pendamping desa dijelaskan bahwa pendamping desa untuk bertugas mendampingi dalam penyelenggaraan pembagunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.[104] Maka pendamping desa dengan kewenangannya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, serta memberikan masukan kepada pemerintah desa berkaitan dengan masyarakat. Hal senada pula di paparkan oleh kepala desa Sukorejo ;

> *"dengan adanya pendamping desa itu justru malah sangat baik sekali, karena apa, karena pendamping desa di sini sangat membantu dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yaitu data sumber dana desa, Dengan adanya pendamping desa itu pemerintahan desa sangat mudah sekali ketika melakukan SPJ, ketika membuat RAP dan Gambar sehingga apa, karena disini pendamping desa itu sangat membatu, membimbing karena apa, karena memang SDM pemerintahan desa itu*

[103] Ainur, *Wawancara*, 14 mei 2018
[104] Pasal 11 No.3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *sebenarnya belum mampu untk melaksanakan program pembangunan yang dari dana desa jadi dengan adanya pendamping itu mala membatu"*[105]

Pemerintahan desa Sukorejo juga sangat terbantu dengan adanya pendamping desa, karena pendamping desa membantu pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana desa. Dalam melakukan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) atau membuat RAP (Rencana Anggaran Pelaksanaan) dan Gambar pendamping desa membimbing, karena pemerintah desa sukorejo sendiri belum mampu untuk melaksanakan program pembangunan dari dana desa. Selain itu hal lain yang di paparkan oleh Kepala Desa Sukorejo;

> *"kegiatan yang di lakukan pendamping desa itu memberikan masukan memberikan apa misalnya itu pendampingan tentang laporan mungkin dari operatur desa mungkin belum memahami dengan adanya pendamping desa sehingga bisa melaksanakan itu dan pendamping itu selalu proaktif dengan kegiatan-kegiatan yang ada di desa tugasnya juga ikut di dalam pembagunan mungkin ada yang tidak sesuai dengan RAB dan Gambar, dengan adanya pendamping itu sangat minim sekali atas kecurangan-kecurangan itu sendiri"*[106]

Dalam hal pendamping desa memberikan masukan kepada pemerintahan desa tentang laporan, mungkin dari aperatur desa ada yang belum mengerti atau belum memahami pendamping itu selalu proaktif untuk membatu kegiatan-kegiatan yang ada di desa karena tugas dari pendamping desa itu sendiri ikut dalam pembagunan mungkin dari pembagunan itu tidak sesuai dengan RAB dan gambar, dengan adanya

[105] Sholeh, *wawancara*, 26 April 2018
[106] Sholeh Arifin, *Wawancara*, 26 mei 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendamping desa ini meminimkan kecurangan-kecurangan yang ada di desa dalam program pembangunan dana desa.

Berikut ini adalah tabulasi hasil temuan pendampingan yang dilakukan oleh pendamping lokal desa yang ada di dua desa yaitu desa Sukorejo dan desa Karanganom:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Tabel 4.1 : Temuan Hasil Penelitian**

| NO | Aspek | Desa Sukorejo | | Desa Karanganom |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mekanisme kerja pendamping Lokal Desa | Perencanaan | - Sosialisasi program Pendamping desa belum maksimal, indikasinya terlihat dari rendahnya partisipasi masyarakat<br>- Belum semua rukun warga RW menyelenggarakan kegiatan rambug desa. | Terjalin kerukunan antar warga sehingga aspirasi masyarakat dapat tersalurkan, misal ; dalam kegiatan rembug desa masyarakat antusias dalam pelaksanaan kegiatan |
| | | | - Kehadiran dan penyampaian aspirasi kurang. | - kehadiran warga dalam musrenbang desa terjadi ( komunikasi dua arah ) antara masyarakat dan pemerintah desa |
| | | | - Pendamping Lokal Desa beserta tim pengendali dari kecamatan akan melakukan survey ke lokasi yang akan di bangun<br>- Dari hasil survey dapat memperkirakan kuantitas dan kualitas bahan yang akan digunakan dalam proses pembangunan | - Pendamping Lokal Desa beserta tim pengendali dari kecamatan akan melakukan survey ke lokasi yang akan di bangun<br>- Dari hasil survey dapat memperkirakan kuantitas dan kualitas bahan yang akan digunakan dalam proses pembangunan |
| | | Pelaksanaan | - Pembuatan RAB (Rancangan Anggaran Biaya), dari hasil survey akan menghasilkan penafsiran/ perkiraan mengenai jumlah berapa besar rencana biaya, jumlah | - Pembuatan RAB (Rancangan Anggaran Biaya), dari hasil survey akan menghasilkan penafsiran/ perkiraan mengenai jumlah berapa besar rencana biaya, jumlah |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | kebutuhan tenaga kerja, bahan dan alat yang di butuhkan dalam pelaksanaan pembangunan | kebutuhan tenaga kerja, bahan dan alat yang di butuhkan dalam pelaksanaan pembangunan |
| | | | - Jika Dana sudah cair, pendamping lokal desa memastikan material yang digunakan sesuai dengan RAB seperti; semen, pasir serta bahan campuran matriel lainnya yang sesuai dengan RAB yang sudah dibuat | - Jika Dana sudah cair, pendamping lokal desa memastikan material yang digunakan sesuai dengan RAB seperti; semen, pasir serta bahan campuran matriel lainnya yang sesuai dengan RAB yang sudah dibuat |
| | | | - Proses pembagunan yang akan dibangun oleh tenaga ahli, ( tidak semua tenaga berasal dari masyarakat desa sendiri) | - Proses pembagunan yang akan dibangun oleh tenaga ahli, (semua tenaga berasal dari masyarakat desa itu sendiri), karena pekerja yang diprioritaskan dan diharapkan sebanyak mungkn dari masyarakat desa itu sendiri. |
| | | | - Kesadaran masyarakat kurang karena lebih mementingkan kepentingan pribadi. | - Kesadaran masyarakat tinggi, karena dalam pelaksanaan program pembangunan tanpa partisipasi dari masyarakat tidak berjalan dengan baik, karena kebjakan tentang program pembangunan dibuat untuk masyarakat sehingga dalam perencanaan serta pelaksanaan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | masyarakat dapat ikut serta. |
| | | Pemantauan/ Monitoring | - Pendamping lokal desa mengawasi dan mencermati segala kemungkinan anggaran pembangunan yang ada di desa sesuai yang sudah di tetapkan atau tidak. | - Pendamping lokal desa mengawasi dan mencermati segala kemungkinan anggaran pembangunan yang ada di desa sesuai yang sudah di tetapkan atau tidak. |
| | | | - Dalam proses pencairan dana harus disertakan LPJ laporan ini berisikan pengeluaran dan pemasukan yang di lakukan pada saat proses pembangunan. | - Dalam proses pencairan dana harus disertakan LPJ laporan ini berisikan pengeluaran dan pemasukan yang di lakukan pada saat proses pembangunan. |
| | | | - Pemerintah desa kurang transparan dalam penggunaan anggaran, seperti; ada teguran/ tindakan dari pihak kecamatan untuk desa sukorejo, pendamping desa sudah mengingatkan, memotivasi serta mengarahkan pendamping lokal desa sudah melaporkan kegiatan yang ada di lapangan ke kecamatan karena atasan yang lebih berwenang. | - Transparan dalam anggaran dana desa, karena transparansi pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan pembangunan. |
| 2. | Tantangan pendamping Lokal Desa | - Sebagian dari perangkat desa tidak *welcome* dengan adanya pendamping lokal desa | | - Perangkat desa *Welcom* dengan adanya pendamping lokal desa, semua masyarakat desa senang |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | karena mereka merasa sangat terbantu dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang ada di desanya. |
| | | - Adanya ketakutan dari pemerintah desa, karena mereka mempunyai asumsi jika kinerja pendamping dikira LSM | - Melaksanakan kegiatan sesuai dengan proseduryang sudah ditetapkan |
| | | - Jadwal pelaksanaan pembinaan tidak semua berjalan tersistematis karena rata-rata SDM perangkat desa masih lemah, hal ini perlu adanya kaderisasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan yang lebih baik. | - |
| | | - Beberapa perangkat desa tergolong orang lama yang masih menjabat dari tahun ke tahun tanpa adanya pergantian jabatan | |
| | | - Kinerja perangkat desa dinilai kurang baik dengan melihat program kegiatan pembbinaan yang tidak semua berjalan sistematis | |
| | | - hubungan antara pendamping desa dan kepala desa tidak begitu akrab dikarenakan pekerjaan yang di lakukan oleh pendamping desa dalam proses pendampingan tidak hanya fokus pada satu desa saja, melainkan banyak desa yang harus didampingi.<br>- | - Birokrasi cukup baik, meski dari tatanan struktur organisasi di desa ini belum semua terisi, namun mereka mampu menjalankan program yang diberikan pemerintah. |
| | | - Berjalan efektif tetapi belum efisien | - Berjalan efektif dan efisien |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | Manfaat Pendamping Lokal Desa | - Membantu dalam dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana desa | - Dengan adanya pendamping desa pelaksanaan kegiatan yang ada di desa |
| | | - Kegiatan yang dilakukan oleh pendamping lokal desa member masukan terhadap kegiatan yang ada di desa | - Memberikan dampak positif bagi desa misal; dalam segi administrasi desa pendamping desa membantu perangkat desa |

# BAB V

# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Mekanisme kerja pendamping desa melalui beberapa tahapan yaitu
   a) Tahap Perencanaan, meliputi *Musrenbangdes*, Survey lokasi, dan penyiapan bahan-bahan yang akan digunakan dalam pembangunan
   b) Tahap Pelaksanaan, meliputi; pendampingan dalam proses pengerjaan pembangunan, menyiapkan material, Penyediaan tenaga kerja (Tukang) sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan memonitoring pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh desa
   c) Tahap pemantauan : pengawasan dan evaluasi secara terperinci dari tahap perencanaan sampai selesai sehingga pembangunan yang dilakuakan dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan, dan membuatan LPJ yang berisikan pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan dalam proses pembangunan agar sesuai dengan rencana.

Dalam mekanisme kerja, Pendamping lokal desa menemukan beberapa temuan di lapangan khususnya di desa Sukorejo, yaitu kurang adanya aspirasi masyarakat dalam forum rembug desa dan Musrenbangdes. Kesadaran masyarakat akan pembangunan perlu ditingkatkan karena masyarakat lebih mementingkan kepentingan



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pribadi dibandingkan keikutsertaan dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam pemerintahan desa juga ditemukan kecurangan dalam pengelolaan dana desa, sehingga transparansi pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan pembangunan

2. Tantangan yang dihadapi pendamping desa dalam pelaksanaan pembangunan desa yaitu tidak semua aparat pemerintah desa menerima keberadaan Pendamping desa, asumsi pemerintah desa yang menilai kinerja Pendamping desa sama dengan LSM, dan rata-rata SDM perangkat desa masih lemah sehingga menyebabkan jadwal pelaksanaan pembinaan tidak berjalan tersistematis.

   Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pendamping lokal desa, tantangan dapat dirangkum dari 3 hal, yaitu komunikasi, Birokrasi, dan Sumber Daya Manusia (SDM) ;

   a) Komunikasi ; dari dua desa yang diteliti, di desa Sukorejo menunjukkan sosialisasi yang belum optimal. Kurang menunjukkan adanya komunikasi dua arah dan kurang ada kesempatan untuk bernegosiasi dalam memberikan masukan atau pendapat dalam program pembangunan

   b) Birokrasi ; Dari temuan dilapangan, desa Karanganom belum sepenuhnya menjalankan program secara efektif karena banyak kekosongan didalam struktur organisasi pemerintahan desa, sedangkan di desa Sukorejo terjalin hubungan yang kurang akrab antara kepala desa dan Pendamping lokal desa selain itu kurang fokusnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendamping lokal desa dalam mendampingi desa karena banyak desa yang perlu pendampingan.

c) SDM ; dari dua desa yang ada, desa Sukorejo menunjukkan tingkat partisipasi yang rendah dalam program pembangunan. jika partisipasi rendah maka akan menjadi hambatan untuk memajukan desa,

Efektifitas pendamping desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa Sukorejo dan Karanganom belum sepenuhnya berjalan optimal, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

a) Desa Sukorejo dalam segi pembangunan berjalan efektif karena ada bentuk nyata dalam bentuk pembangunan infrastruktur, akan tetapi belum dikatakan efisien karena sumber daya tidak diberdayakan secara optimum seperti peran atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa tersebut.

b) Sedangkan di desa Karanganom, pembangunan berjalan efektif serta efisien karena sumber daya diberdayakan secara optimal dan tepat sasaran.

3. Manfaat adanya pendamping desa di desa Sukorejo dan Karanganom yaitu memberi dampak positif bagi desa dalam pembangunan desa, seperti membantu pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana desa mulai dari pembuatan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) atau membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya), dan membantu program- program pembangunan dari dana desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. SARAN

1. Melihat kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa sukorejo, maka perlu adanya peran pemerintah untuk merangsang masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pembangunan.
2. Pendamping harus melakukan pendekatan sosial, pendekatan yang dilakukan lebih sering berkomunikasi dengan desa dan masyarakatnya sehingga akan terjalin ikatan yang baik.
3. Kualitas SDM perangkat desa perlu ditingkatkan, hal ini perlu adanya kaderisasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan yang lebih baik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR PUSTAKA


Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membagun Desa Partisipatif.* Graha Ilmu: Yogyakarta

Adisasmita, Rahardjo. 2006.*Pembagunan Pedesaan dan Perkotaan.* Graha Ilmu: Yogyakarta

Adisasmita, Rahardjo. 2011.*Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah.* Graha Ilmu: Yogyakarta

Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Pedesaan; Pendekatan Partisipatif, Tipologi Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan.* Graha Ilmu: Yogyakarta

Admosudiharjo, Prajudi, 1987 *Managemen Sumber Daya Manusia*, Galia Indonesia: Jakarta

Arikunto Suharsimi, 1996.*Pengelolaan sebagai sebuah pendekatan Evaluatif*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta

Arsyad, Lincolin. dan Soeatno. 1995. *Metode Penelitian*. Unit Penerbit dan percetakan Akademi Managemen Perusahaan YKPN: Yogyakarta

Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Kenaca Prenada Media Group: Jakarta

Chalik Abdul, dkk, 2015. *Pelayanan Publik Tingkat Desa*, Interpena: Yogyakarta

Chalik Abdul, 2016. *Laporan Survey kompetisi Pelayanan Publik Tingkat Desa The Sunan Giri Award Tahun 2016*, Gresik

http://lampos.co/berita/kinerja-pendamping-lokal-desa-dinilai-belum-maksimal di akses pada 5 April 2018 pukul 11.33 WIB


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

http://www.artikelsiana.com/2015/11/kebijakan-publik-pengertian-contoh-ciri.html, diakses pada Rabu, 15 November 2017, pukul 08.51 WIB.

http://www.psychologymania.com/2012/12/definisi-efektivitas.html, diakses pada Jum'at, 29 juni 2018 pukul 08.54 WIB.

http:/www.harianjogja.com/baca/2016/03/25dana-desa-kades-keluhkan-kinerja-petugas-pendamping-desa-704157 di akses pada 5 April 2018 pukul 11.55

https://suarakebebasan.org/id/opini/item/399-john-rawls-dan-konsep-keadilan, diakses pada Rabu, 15 mei 2018, pukul 09.04 WIB.

Kencana Syafie, Inu. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. PT. Rineka Cipta: Jakarta

Kusnadi, Moh.1998. *Hukum Tata Negara Indonesa*. Sinar Bakti: Jakarta

Mahmudi,2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP AMP YKPN: Yogyakarta.

Maria Christina "*Kinerja pendamping Desa Dalam peningkatan pembangunan desa di kecamatan kalirejo kabupaten lampung tengah*" skripsi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas lampung. 2017

Marzali Amri, 2012. *Antropologi dan Kebijakan Publik*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta

Marzali, Amri. 2012. *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Kencana Prenada Media: Jakarta

Melda Budiarti "*Kesiapan Dan Strategi Pemerintah Desa DalamImplementasi Kebijakan Undang Undang Nomor 6 Tahun2014 Tentang Desa(Studi Penelitian Di Desa Sumur Tujuh Kec. Wonosobo Kab.Tanggamus)*" Skripsi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas lampung. 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Moeleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif.* PT Remaja Rosdakarya: Bandung

Moh Mohlis *" Telaah Yuridis terhadap pelaksanaan pendamping desa dalam mewujudkan kesejahteraan studi kasus di kecamatan Guluk-guluk kabupaten sumenep*" Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yagyakarta. 2016

Moleong, Laxy J. 1999. *Metode penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung

Mulyana, Dedy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT,Rosda Karya: Bandung

N Dunn, William, 2003.*Analisis Kebijakan Publik,* Gadjah Mada University Press: , Yogyakarta

Nogi Tangkilisan, Hesel, 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Lukman Offset YPAPI : Yogyakarta:

Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentag Kementerian Desa

Rizky Prasojo dan Luluk Fauziyah "*Peran Pemerintah-Masyarakat dalam pemabngunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo"* Jurnal KANAL. Prodi Ilmu Administrasi Negara-FISIP Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Volume 3, No 1, hal 49 tahun 2015

Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitin Sosial*. Tiara Wacana: Yogyakarta

Sedamayanti, 2003.*Good Govermance: Kepemrintahan yang baik dalam rangka otonomi daerah upaya membangun organisasi efektif dan efisien melalui restrukturisasi dan pemberdayaan*, Mandarmaju: Bandung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id